

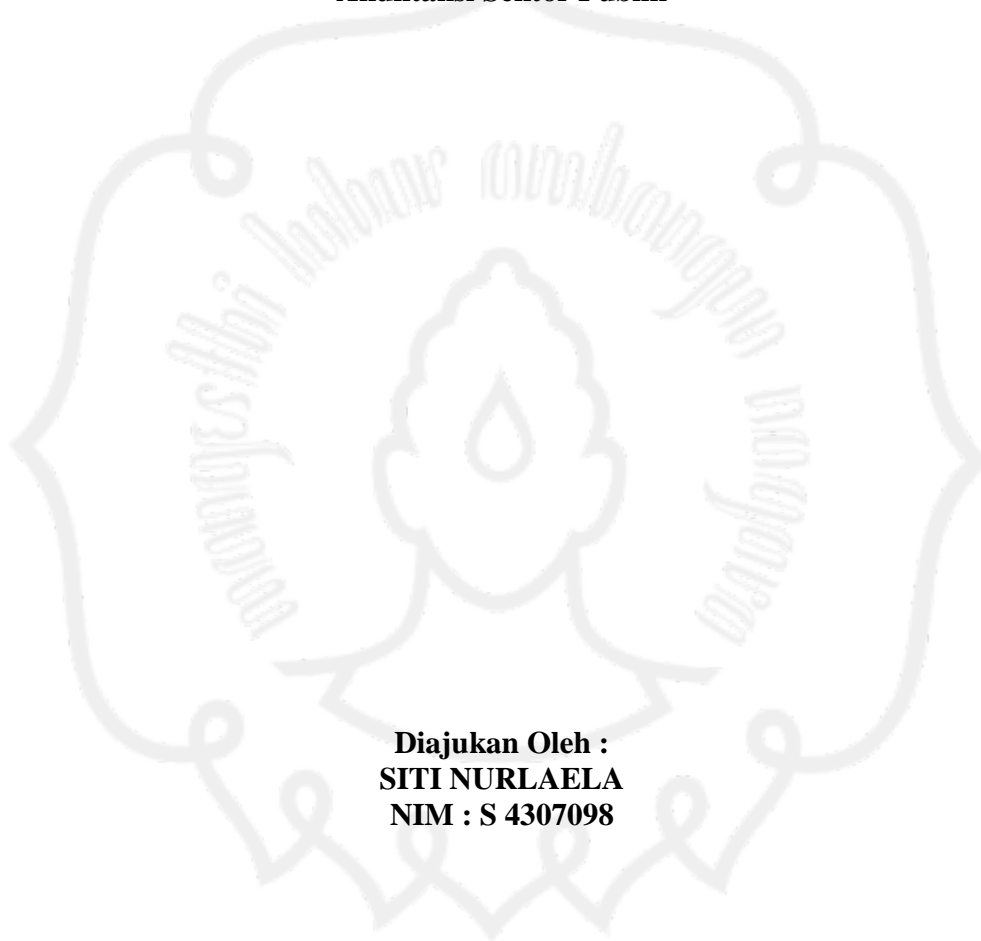
**FAKTOR KEPERILAKUAN ORGANISASI TERHADAP KEGUNAAN  
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH  
DI SUBOSUKOWONOSRATEN**

**Usulan Penelitian Tesis**

**Program Studi Magister Akuntansi**

**Minat Utama :**

**Akuntansi Sektor Publik**



**Diajukan Oleh :  
SITI NURLAELA  
NIM : S 4307098**

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA  
2009**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Latar belakang penelitian ini adalah atas peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah menunjukkan reformasi pengelolaan keuangan Negara. Paket peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya adalah : 1). Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 2). Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, 3). Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Paket peraturan perundang-undangan tersebut menggantikan ketentuan perundang-undangan warisan kolonial yang sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan pengelolaan keuangan Negara modern. Selain paket peraturan perundang-undangan keuangan tersebut diatas, juga telah diterbitkan peraturan perundang-undangan yang lain yang berkaitan dengan pengaturan keuangan sehubungan dengan adanya desentralisasi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya adalah: 1). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, 2). Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, 3). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 4). Peraturan Pemerintah

Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 5). Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah .

Dengan lahirnya Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, pengelolaan keuangan daerah akan menjadi transparan untuk tahun 2007 dan seterusnya. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melaksanakan akuntansi terhadap transaksi ekonomi yang terjadi pada bagiannya, sehingga menghasilkan laporan keuangan. Oleh karena itu, pada tahun anggaran 2007 SKPD di setiap Kabupaten mulai berupaya mengimplementasikan sistem akuntansi keuangan berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, berbagai peraturan serta perundang-undangan tersebut diatas diharapkan dapat dijadikan landasan yang kokoh bagi pengelola keuangan Negara dalam rangka menjadikan *good governance* dan *clean government*. Reformasi pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian terintegrasi dengan pengelolaan keuangan Negara merupakan hal yang harus diterima dan diterapkan oleh pemerintah daerah.

Pelaporan dan pertanggungjawaban mengalami perubahan yang besar. Bentuk Laporan pertanggungjawaban sebelumnya hanya berupa laporan perhitungan APBD, saat ini laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan. Laporan Keuangan tersebut merupakan satu kesatuan yang terdiri dari

Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) .

Pengembangan Sistem memerlukan suatu perencanaan dan pengimplementasian yang hati-hati, untuk menghindari adanya penolakan terhadap sistem yang dikembangkan. Suatu keberhasilan implementasi sistem tidak hanya ditentukan pada penguasaan teknis belaka, namun banyak penelitian menunjukkan bahwa factor perilaku dari individu pengguna sistem sangat menentukan kesuksesan implementasi (Bodnar dan Hopwood, 1995). Faktor perilkakuan yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi faktor organisasional (Pelatihan, Kejelasan Tujuan, dan Dukungan Atasan ) serta adanya konflik kognetif dan afektif yang juga berpengaruh dalam implementasi sistem yang berkaitan dengan masalah individu personal.

Penelitian yang dilakukan oleh Jawad (1997) tentang Faktor-faktor yang menentukan kesuksesan implementasi sistem teknologi informasi, menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi faktor teknologi, faktor organisasi, faktor manajemen, faktor manusia dan faktor eksternal. Penelitian tentang implementasi inovasi pengukuran kinerja pemerintahan dilakukan oleh Cavalluzzo dan Inner (2004) menunjukkan bahwa beberapa faktor teknik dan faktor organisasional meliputi komitmen manajemen, otorisasi, pengambilan keputusan , pelatihan dan mandate dari legeslatif berhubungan dengan implementasi inovasi sistem pengukuran. Chenhall (2004) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa factor-faktor perilaku selama implementasi akan meningkatkan kegunaan sistem ABCM pada perusahaan.

Penelitian yang dilakukan Sabeni dan Latifah (2007), tentang Faktor-faktor Keperilakuan Organisasi Dalam Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berdasarkan hasil bahwa dari faktor organisasi yang diuji, hanya dukungan atasan yang berpengaruh untuk meningkatkan kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Pengaruh Pelatihan dan Kejelasan atas Tujuan terhadap kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berhasil dibuktikan. Konflik Kognitif tidak berhubungan positif dengan kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Konflik Afektif berhubungan negative dengan kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Penelitian ini mendukung dari penelitian Chenhall (2004) dimana factor konflik afektif berhubungan dengan kegunaan sistem ABCM. Hubungan tidak langsung antara faktor organisasional dengan sistem yang dimediasi dengan konflik kognitif ada perbedaan yang sangat kecil. Dan saran untuk peneliti lanjutan dengan lebih banyak dan tidak terbatas pada Dinas dan kantor dan Badan Pengelola Keuangan Daerah saja. Namun diperluas untk seluruh Dinas di Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Kota. Perlu dilakukan pengembangan instrumen yaitu disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan dari objek yang dteliti.

Penelitian yang dilakukan Heri Hidayat (2008) tentang Analisis Implikasi Ketidaksesuaian Rancangan Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah (SIKPD), hasil menunjukkan bahwa sebanyak 38 temuan yang mengindikasikan perbedaan antara aturan (format standart) yang berlaku yaitu PP no. 58 Tahun 2005 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006, dikarenakan belum menggunakan Struktur organisasi baru yang sesuai PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 47 Tahun 2006 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006.

Penelitian yang dilakukan Azhar (2008), tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Regulasi, komitmen, SDM bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan Permendagri No. 13 tahun 2006, sedangkan regulasi tidak mempengaruhi secara signifikan.

Penelitian yang dilakukan Kurnia Sari Nur dan Pangesti (2008) tentang Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan SKPD Study kasus penerapan permendagri nomor 13 tahun 2006 di pemerintah daerah kabupaten Batang, Variabel kesesuaian struktur organisasi berdasarkan permendagri no 13 tahun 2006 menunjukkan pengaruh yang negative dan signifikan terhadap efektifitas implementasi sistem akuntansi keuangan dalam menghasilkan laporan keuangan . Sedangkan Variabel Bukti Transaksi dan klasifikasi Rekening tidak mempunyai pengaruh positif tetapi tidak signifikan.

Penelitian ini akan menguji Pengaruh Faktor Perilaku Terhadap Kegunaan Sitem Akuntansi Keuangan Daerah sesuai Permendagri No. 59 Tahun 2007 Atas Perubahan Permendagri No.13 Tahun 2006, dimana sistem tersebut mulai diimplementasikan di seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian ini akan menguji pengaruh faktor perilaku organisasional, konflik kognitif dan afektif dalam meningkatkan kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di Pemerintah Daerah SUBOSUKAWONOSRATEN (Kotamadya Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten).

Penelitian ini ada perbedaan dengan penelitian sebelumnya, perbedaan-perbedaan tersebut adalah:

- a. Populasi penelitian ini tidak hanya pegawai negeri sipil yang bekerja di bagian keuangan Kantor Sekretaris Daerah dan Badan Pengelola Keuangan Daerah saja akan tetapi populasinya adalah semua Dinas SKPD masing-masing Kota dan Kabupaten di SUBOSUKAWONOSRATEN.
- b. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 Atas Perubahan Permendagri No. 13 Tahun 2006
- c. Sejalan dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/079/BAKD Tanggal 12 Februari 2008 hal Pedomanan Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
- d. Memberikan gambaran mengenai operasionalisasi penerapannya dalam proses pencatatan akuntansi baik pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) maupun satuan kerja pengguna Anggaran (SKPD).

## **B. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah dalam penelitian ini dinyatakan dengan pertanyaan riset berikut :

1. Apakah Faktor Organisasi seperti Dukungan Atasan, Kejelasan Tujuan dan Pelatihan akan berpengaruh langsung meningkatkan kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ?
2. Apakah Faktor organisasi seperti dukungan Atasan, Kejelasan Tujuan dan Pelatihan dengan variabel intervening dapat meningkatkan konflik kognitif, menurunkan konflik Afektif yang pada gilirannya akan meningkatkan kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ?

### C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah , maka tujuan penelitian dijelaskan sebagai berikut :

1. Menguji pengaruh langsung faktor organisasional seperti Dukungan Atasan, Kejelasan Tujuan dan Pelatihan dalam meningkatkan kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah .
2. Menguji pengaruh tidak langsung faktor organisasi seperti Dukungan Atasan, Kejelasan Tujuan dan Pelatihan melalui variabel intervening akan dapat meningkatkan konflik kognitif, menurunkan konflik afektif yang pada gilirannya akan meningkatkan kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah .

### C. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak :

1. Bagi Akademisi :  
Dapat memberika kontribusi dalam menambah Literatur mengenai Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

2. Bagi Praktisi :

Sebagai Bahan Pertimbangan dan Masukan bagi Pemerintah Daerah dalam Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang transparansi dan akuntabilitas .



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

#### A. Penelitian Terdahulu

Lucas (1973) di awal implementasi sistem informasi menunjukkan faktor-faktor personal, model keputusan, dan sikap pengguna mempengaruhi adopsi sebuah sistem. Zmud (1979) menunjukkan menarik perhatian dari beberapa peneliti secara khusus *personality* pada kesuksesan sistem manajemen informasi. Bagaimana peran *personality* telah diekstrak (*extracted*) secara utama yang berasal dari penelitian dalam konteks bukan pada sistem manajemen informasi dan dibatasi pada hubungan cognitive sebagai antreseden dari kesuksesan sistim informasi.

Bodnar dan Hopwood (1995) suatu keberhasilan implementasi sistem tidak hanya ditentukan pada penguasaan teknis belaka, namun banyak penelitian menunjukkan bahwa faktor perilaku dari individu pengguna sistem sangat menentukan kesuksesan implementasi. Penelitian yang dilakukan oleh Jawad (1997) tentang Faktor-faktor yang menentukan kesuksesan implementasi sistem teknologi informasi, menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi faktor teknologi, faktor organisasi, faktor manajemen, faktor manusia dan faktor eksternal. Penelitian tentang implementasi inovasi pengukuran kinerja pemerintahan dilakukan oleh Cavalluzzo dan Inner (2004) menunjukkan bahwa beberapa faktor teknik dan faktor organisasional meliputi komitmen manajemen, otorisasi, pengambilan keputusan, pelatihan dan mandate dari legeslatif.

Penelitian yang dilakukan Wijayanto dan Istiningsih (2007) tentang Pengaruh Kualitas Sistem Informasi, Perceived Usefulness, Dan Kualitas Informasi Terhadap Kepuasan Pengguna Akhir Software Akuntansi hasil bahwa sistem quality terbukti secara signifikan berpengaruh positif terhadap perceived usefulness; informasi quality terbukti secara signifikan berpengaruh positif terhadap user satisfaction, informasi quality terbukti secara signifikan berpengaruh positif terhadap user satisfaction, perceived usefulness terbukti secara signifikan berpengaruh positif terhadap user satisfaction.

Hartono (2007) Kehadiran sistem teknologi informasi telah banyak mengubah organisasi. Saat ini organisasi mulai bergantung pada sistem teknologi informasi. Walaupun manajer-manajer senior yang mengambil keputusan untuk mengadopsi suatu sistem teknologi informasi, tetapi keberhasilan penggunaan teknologi tersebut tergantung dari penerima dan penggunaan oleh individu-individu . Dengan demikian, manfaat dan dampak langsung dari sistem teknologi informasi ini adalah terhadap individual pemakai dan yang kemudian akan meningkatkan produktivitas organisasi.

Romdani (2007) menunjukkan bahwa faktor kepribadian merupakan faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan teknologi. Hal tersebut ditunjukkan dengan penggunaan faktor kepribadian sebagai faktor yang menentukan penerimaan .

Dalam Penelitian Monalisa (2009), tentang Pengaruh Kesiapan Individu Pada Niat Keperilakuan menggunakan E-Learning, User Acceptance terhadap sistem pembayaran elektronik belum dapat dirasakan kehadirannya oleh masyarakat.

Menurut Dillon&Morris ” *User Acceptance* dapat didefinisikan bahwa pemahaman yang baik dan persepsi yang sesuai terhadap teknologi yang digunakan dapat dipengaruhi oleh tujuan dari karakteristik sistem/teknologi seperti faktor manusia dan interaksi manusia dengan sistem. Sebagai contoh, Social Information Processing Model (SIPM) (Salancik&Pfeffer) memperkirakan perilaku dalam menggunakan teknologi/sistem dipengaruhi oleh informasi, perilaku/kebiasaan. Menurut Davis, Burkhardt, Rice&Adyn sikap manusia dan faktor manusia menjadi aspek penting dari keberhasilan suatu sistem/teknologi.

Penelitian yang dilakukan Heri Hidayat (2008) tentang Analisis Implikasi Ketidakesesuaian Rancangan Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah (SIKPD), hasil menunjukkan bahwa sebanyak 38 temuan yang mengindikasikan perbedaan antara aturan (format standart) yang berlaku yaitu PP no. 58 Tahun 2005 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006, dikarenakan belum menggunakan Struktur organisasi baru yang sesuai PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 47 Tahun 2006 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006.

Penelitian yang dilakukan Azhar (2008), tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Regulasi, komitmen, Sumber Daya Manusia bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan Permendagri No. 13 tahun 2006, sedangkan regulasi tidak mempengaruhi secara signifikan.

Penelitian yang dilakukan Kurnia Sari Nur dan Pangesti (2008) tentang Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan SKPD Study kasus penerapan permendagri nomor 13 tahun 2006 di pemerintah daerah kabupaten Batang, Variabel kesesuaian struktur organisasi berdasarkan permendagri no 13 tahun 2006 menunjukkan pengaruh yang negative dan signifikan terhadap efektivitas implementasi sistem akuntansi keuangan dalam menghasilkan laporan keuangan. Sedangkan Variabel Bukti Transaksi dan klasifikasi Rekening tidak mempunyai pengaruh positif tetapi tidak signifikan.

Penelitian yang dilakukan Abdul Rohman (2009) tentang Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan dan kinerja pemerintah Daerah (survei pada Pemerintah Daerah di Jawa Tengah) penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sistem akuntansi pemerintahan dan implementasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap fungsi pengawasan intern. Hasil ini mengidentifikasi bahwa implementasi sistem akuntansi dan sistem pengelolaan keuangan daerah dapat mempengaruhi atau memperlancar pelaksanaan fungsi pengawasan intern pada pemda di Jawa Tengah. Implementasi pengelolaan keuangan daerah berorientasi pada kinerja merupakan syarat implementasi konsep *value for money* (VFM) yang merupakan ukuran kinerja pemda. Fungsi pengawasan intern membantu para anggota organisasi dalam melaksanakan tanggungjawabnya secara efektif dan mencapai kinerja yang lebih baik. Fungsi pengawasan intern memonitor apakah perilaku sudah berorientasi pada pencapaian kinerja yang baik, dan melakukan koreksi atas perilaku dan hasil yang menyimpang dari kinerja yang diinginkan.

## B. Landasan Teori

### 1. Faktor Keperilakuan Organisasi

Variabel faktor organisasi dalam implementasi sistem ada tiga aspek, meliputi dukungan atasan, kejelasan tujuan, dan pelatihan.

Faktor-faktor tersebut didefinisikan sebagai berikut (Chenhall, 2004) :

- a. **Dukungan Atasan** diartikan sebagai keterlibatan manajer dalam kemajuan proyek dan menyediakan sumber daya yang diperlukan .
- b. **Kejelasan Tujuan** didefinisikan sebagai kejelasan dari sasaran dan tujuan digunakannya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di semua level organisasi.
- c. **Pelatihan** merupakan suatu usaha pengarahan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman mengenai sistem.

Boston et al (1996) mengidentifikasi *Public Choice theory*, teori agensi dan *transactional cost economics* sebagai paradigma yang dominan ketika siap untuk mereformasi pemerintah: a). *Public Choice theory* menganggap semua tingkah laku manusia didominasi oleh kepentingan pribadi. Public Choice diaplikasikan sebagai usaha untuk peran pemerintah, meningkatkan transparansi dll. b). *Teori Agensi* dengan asumsi peningkatan kepentingan pribadi yang menyebabkan konflik antara principal dan kontraktual untuk mengatasi masalah moral hazard dan asimetri informasi. c). *Transactional Cost Economic* berfokus pada struktur pemerintah yang optimal. Menurut Yin (1994) melakukan penelitian dengan *multiple-case design* dengan sub unit yang menjadi peran penting.

Fokus pada orang-orang yang memiliki pengaruh dalam organisasi secara umum dan Pettigrow (1992) melakukan penelitian yang lebih spesifik yang menyadari pentingnya kelas eksekutif inti yang mengontrol pengendalian dan alokasi sumber daya. Dezin (1978) meneliti gambaran dari unsure pokok organisasi yang terpisah (manajemen dan anggota yang dipilih) dengan menggunakan data, laporan informasi keuangan dalam local Authorities. Dengan menggunakan wawancara semi directed. Yang diinterview adalah CEO, direktur keuangan, direktur strategi dan orang-orang yang memegang peran pokok (pendidikan, pelayanan social, ekonomi). Ide New Public Management tidak sepenuhnya merupakan hal baru. Hood, 1995; Gruening; 2001; Ferlie dan Steane, 2002) Gruening, (2001) sebagai contoh, menyatakan bahwa NPM pertama kali dikembangkan di Inggris tahun 1970 di bawah Perdana Menteri Margareth Theather. Diawal tahun 1980 ide NPM juga diimplementasikan di beberapa pemerintah kota do California.

NPM adalah reformasi sector public., ini berdampak kuat pada penggunaan teknik akuntansi akrual pada organisasi sector public yang merupakan dampak langsung adopsi NPM.

*Contingency Theory*, dipelopori oleh Burn dan Stalker (Otley, 1980), dalam penelitian tahun 1950-an di Inggris tentang task environment, Dalam penelitiannya mengidentifikasi tipe struktur dan praktek manajemen yang tepat untuk berbagai kondisi lingkungan yang berbeda. Hasilnya menunjukkan bahwa Organisasi yang mekanistik (dengan cirri-ciri pembagian tugas yang spesifik dan tegas) tepat untuk lingkungan yang stabil, sedangkan organisasi yang

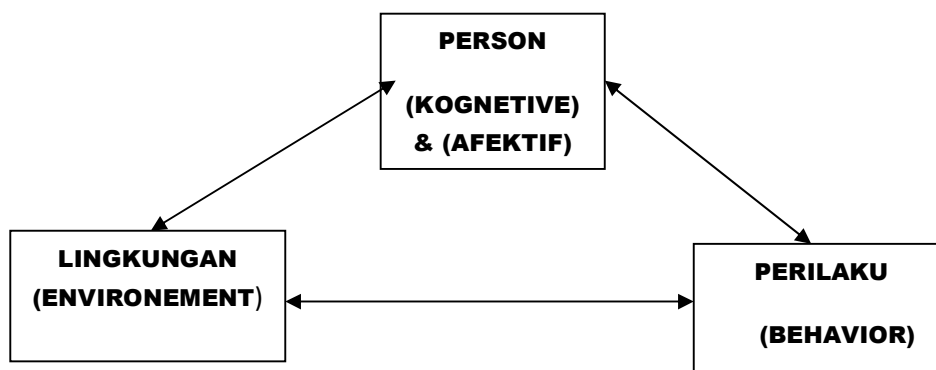
dinamis (dengan ciri-ciri struktur yang fleksibel) tepat untuk lingkungan yang tidak stabil.

Otley (1980), menyatakan Teori kontijensi didasarkan pada premis bahwa tidak ada sistem yang secara universal selalu tepat diterapkan pada seluruh organisasi pada setiap keadaan, tetapi sistem akuntansi tersebut tergantung pada faktor-faktor situasional dalam organisasi. Kesesuaian (*fit*) yang lebih lebih baik antara sistem pengawasan dengan variabel kontijensi menghasilkan kinerja organisasi yang meningkat. Berdasarkan pada *Contingency Theory*, dapat dikatakan bahwa keberhasilan implementasi sistem akuntansi, sistem pengelolaan keuangan daerah, tergantung pada kondisi Pemda yang bersangkutan.

*Sosial Cognitive Theory* (SCT) menjelaskan fungsi *psychosocial* dalam tiga hal yang berhubungan timbal balik yaitu perilaku, factor personal yang meliputi (*kognitif, Afektif dan biological*) serta lingkungan eksternal.

**Gambar : 1**

**Skema Hubungan antara Perilaku (Behaviar) (B),  
Faktor Personal (Kognitif, Afektif dan Biologica Event) (P),  
Lingkungan Ekternal (E).**



Sumber : (Bandura, 1986)

Sikap seseorang dalam merespon suatu inovasi seperti diimplementasikannya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh lingkungan didalam organisasi dan faktor personal yang meliputi afektif dan kognitif. Faktor lingkungan organisasi dapat mempengaruhi jalannya implementasi Sistem Akuntansi keuangan daerah yang baru diimplementasikan yang pada akhirnya akan mempengaruhi kesuksesan implementasi tersebut. Faktor Lingkungan yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi pelatihan, kejelasan tujuan serta dukungan atasan.

## 2. Variabel Intervening Konflik Kognitif dan Konflik Afektif

Memaksimalkan konflik kognitif dan meminimalkan konflik afektif Tuckman (1988) menyatakan bahwa variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini merupakan variabel penyela/antar yang terletak diantara variabel independen dan dependen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen.

**Konflik kognitif** dapat bermanfaat untuk memecahkan masalah dan mendorong ke arah perbaikan pengambilan keputusan. Manfaat yang diperoleh dari konflik kognitif berasal dari potensinya untuk menyediakan kesempatan untuk interaksi dengan dialectical style, berdebat, mempertahankan argument yang memiliki melawan



argument lain dalam organisasi (Mitroff dan Emshoff, 1979, Janis, 1982; Swweiger dan Sandlerg, 1989 dalam Chenhall, 2004).

**Konflik afektif** cenderung melibatkan persepsi yang mengancam posisi seseorang di dalam suatu kelompok, pertikaian, frustrasi dan fraksi antara pribadi seseorang dengan nilai norma yang ada (Petersen, 1983; Ross, 1989 dan Amason, 1996 dalam Chenhall, 2004). Konsekuensi yang tidak diinginkan dari konflik afektif di antaranya memperlambat komunikasi dan proses kognitif, mengurangi kekohesifan kelompok dalam menerima ide baru, dan usaha saling menjatuhkan diantara para manajer (Robbins, 1989 dan Pelled, 1996). Beberapa kasus yang terdapat dalam penelitian Chenhall (2004) mengenai implementasi Activity Based Costing Manajemen, konflik afektif ini berpotensi dapat mengurangi kegunaan ABCM untuk perencanaan produk dan manajemen biaya.

*Cognitive* adalah istilah yang digunakan dalam psikologi kognitif untuk menggambarkan suatu bentuk pikiran atau persepsian dari setiap individu, atau mereka lebih menyukai pendekatan untuk penggunaan seperti informasi dalam menyelesaikan masalah (Wikipedia).

Salah satu hal yang baru ditahun 1960 adalah mempelajari bagaimana orang berfikir, merasakan, belajar, mengingat, membuat keputusan. Dan bagaimana orang memproses (mempersiapkan, mengapresiasi, menyimpan dan mengambil) data di memori otak. Psikologi kognitif adalah ilmu pengetahuan ilmiah dari psikologi yang mempelajari kondisi, yaitu proses-proses mental yang mendasari perilaku . Psikologi kognitif mempunyai riset dominan yang luas termasuk bekerja dengan memori, atensi,

persepsi dan representasi pengetahuan, memberi alasan, kreativitas dan pemecahan masalah (Hartono, 2007).

Beberapa penelitian telah menekankan bahwa pentingnya cognitive sebagai variabel penting yang mempengaruhi sikap dan penerimaan pengguna dalam manajemen sistem informasi (Benbansat dan Taylor, 1978; Lucas 1981; Matson dan Metroff, 1973; Robey, 1983; Sage, 1981; Zmut, 1975, cognitive berkenaan dengan proses karakteristik individu dalam analisis, evaluasi dan interpretasi dari data yang digunakan untuk pengambilan keputusan, sebagai dasar yang mana mereka mengklasifikasikan sebagai sistematis-heuristics (Bariff dan Lucks, 1997), *analytic-heuristics* (Driver dan mock, 1975; Vasarhelyie, 1977) atau *sensing-thinking* dan *intuition felling* (Benbansat dan Taylor, 1978; Henderson dan Nutt, 1980; Matson dan Mitroff, 1973), dikutip dalam McElroy, 2007.

*Self efficacy* didefinisikan sebagai kepercayaan atau keyakinan seseorang, menyangkut kemampuan dia dalam melakukan aktivitas atau tindakan (Bandura 1986). *Self efficacy* merupakan konsep penting dalam ilmu psikologi sosial yang diturunkan dari teori pembelajaran (sosial kognitive). Hacket dan Betz (1981) menyamakan *self efficacy* sebagai sebuah variabel yang dapat mempengaruhi pencapaian suatu tindakan, keputusan akademik atau karier, dan perubahan karier.

Seseorang yang memiliki *self efficacy* yang tinggi, lebih giat dan gigih usahanya untuk meraih tujuan yang diinginkannya, bahkan ketika menemui halangan atau permasalahan. Adapun seseorang yang memiliki *self efficacy* yang rendah akan mudah menyerah ketika menghadapi permasalahan (Bandura 1986). Penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa *self-efficacy* yang berhubungan dengan karir adalah sebuah

variabel yang dapat mempengaruhi keinginan berpindah (Saks 1992). Wood dan Bandura (1989) menyarankan bahwa individu yang memiliki *self-efficacy* yang lebih tinggi memiliki keraguan yang sedikit dan berusaha memperoleh aktivitas yang menantang atau pekerjaan baru.

Teori kognitif sosial mengharapkan *self efficacy* individu mempunyai pengaruh langsung pada tugas mereka dan persistensi dalam pencapaian tugas. Dalam literature penerimaan computer, sejumlah studi menemukan bahwa *self efficacy* yang tinggi berhubungan dengan berbagai macam produk teknologi. *Self efficacy* adalah suatu ukuran kepercayaan dalam kemampuan menggunakan suatu teknologi. Faktor ini juga berdampak pada keyakinan atas diri mereka mengembangkan persepsi positif *self efficacy* secara umum terhadap penggunaan komputer dan teknologi internet yang merupakan tantangan utama. Seseorang yang memiliki *self efficacy* yang tinggi, lebih giat dan gigih usahanya untuk meraih tujuan yang diinginkannya, bahkan ketika menemui halangan atau permasalahan. Adapun seseorang yang memiliki *self efficacy* yang rendah akan mudah menyerah ketika menghadapi permasalahan (Bandura, 1986). Ini akan mempengaruhi potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Apabila dia merasa terkekang dan tidak dapat berkembang, maka kecenderungan untuk berpindah pada dirinya akan meningkat.

Igbaria dan Parasuraman (1989) menemukan dalam penelitiannya bahwa kecenderungan seseorang menjadi susah, khawatir atau ketakutan terhadap komputer (*computer anxiety*) di masa sekarang dan masa yang akan datang mempunyai pengaruh terhadap sikap pemakai terhadap teknologi komputer. Oleh karena itu sikap negative pemakai mengakibatkan rendahnya tingkat keahlian dalam penggunaan komputer,

tingginya *computer anxiety* mempunyai pengaruh negatif terhadap keahlian yang bersangkutan dalam menggunakan komputer.

Harrison dan Rainer (1992) menguji pengaruh perbedaan individual terhadap keahlian End-User Computing. Penelitian dilakukan terhadap 776 karyawan suatu universitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh faktor demografi (umur, jenis kelamin, dan pengalaman), personality (computer *anxiety*, computer attitudes, dan math *anxiety*, kecuali sikap optimis terhadap komputer) dan cognitive style originality of cognitive style) terhadap keahlian dalam End-User Computing. Sabherwal dan Elam (1995) mengemukakan bahwa sikap pemakai komputer merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja (keahlian) individual dalam penggunaan komputer. Keahlian seseorang dalam penggunaan komputer pada gilirannya mempengaruhi kesuksesan penerapan teknologi informasi.

Triandis (1980) menggunakan istilah perasaan (Affect) yang merupakan perasaan-perasaan bahagia, gembira, riang atau senang, atau depresi, jijik, tidak nyaman, atau benci yang dihubungkan dengan seorang individual kesuatu tindakan tertentu. Compeau dan Higgs (1995); Compeau et al, (1999) mendefinisikan perasaan adalah suatu kesukaan individual terhadap perilaku. Menurut Goodhue (1988), banyak peneliti yang membedakan antara komponen emosional dari sikap (yang memiliki konotasi suka/tidak suka) dan komponen kognitif atau kepercayaan bahwa *affect* tidak berpengaruh signifikan terhadap pemanfaatan *personal computer*.

### **3. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah .**

#### **a. Pengertian Akuntansi**

Ada berbagai definisi atau pengertian akuntansi yang berasal dari berbagai lembaga dan dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Menurut Accounting Principles Board (1970), *Akuntansi* adalah kegiatan jasa. Fungsinya menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomik dalam membuat pilihan-pilihan yang nalar diantara berbagai alternatif arah tindakan.

Menurut *American Accounting Association* (1966), *Akuntansi* adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi/entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan : *Akuntansi* adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengiktisaran transaksi, dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta laporan.

Dari definisi diatas menunjukkan bahwa pengertian akuntansi haruslah menghasilkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Apabila dikaji dari entitas penyusunan laporan keuangan , maka akuntansi terbagi menjadi akuntansi sector privat dan akuntansi sector public. Akuntansi yang berkaitan dengan organisasi perusahaan (bisnis) biasanya dikenal dengan akuntansi sektor privat, dan yang berkaitan dengan organisasi pemerintahan atau lembaga non

profit dikenal dengan akuntansi pemerintahan atau akuntansi sektor publik, karenanya akuntansi keuangan daerah termasuk skuntansi sektor publik.

Selain klasifikasi tersebut, akuntansi dikelompokkan berdasarkan pemakai laporan keuangan . Berdasarkan pemakai laporan keuangan akuntansi terbagi menjadi dua, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. **Akuntansi Keuangan** adalah akuntansi yang diajukan untuk menyediakan informasi bagi pihak luar entitas pembuatan laporan keuangan, sedang **Akuntansi Manajemen** adalah akuntansi yang ditujukan untuk menyediakan informasi bagi pihak dalam entitas pembuatan laporan keuangan.

Dalam akuntansi komersial, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi keuangan kepada manajemen, pemilik modal, penanam modal, kreditor, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Dalam akuntansi pemerintahan data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislatif, dan masyarakat. Akuntansi keuangan daerah menghasilkan informasi bagi pihak intern maupun ekstern pemerintah daerah, sehingga dapat digolongkan sebagai akuntansi manajemen maupun akuntansi keuangan.

Akuntansi Pemerintahan mempunyai beberapa tujuan yaitu: 1). **Pertanggungjawaban** (*accountability and Stewardship*), tujuan pertanggungjawaban memiliki arti memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintahan. Lebih

lanjut, tujuan pertanggungjawaban ini mengharuskan tiap orang atau badan yang mengelola keuangan Negara harus memberikan pertanggungjawaban atau perhitungan. 2). **Manajerial**, tujuan manajerial berarti bahwa akuntansi pemerintahan harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan, dan pengambilan keputusan, serta penilaian kinerja pemerintah.3). **Pengawasan**, tujuan pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

Sistem pencatatan dalam akuntansi yaitu *single entry* dan *double entry*. Karena pemerintah daerah sudah harus membuat laporan keuangan dalam bentuk neraca, laporan realisasi anggaran, dan arus kas maka akuntansi keuangan daerah sudah harus menggunakan sistem pencatatan *double entry* atau berpasangan, artinya setiap transaksi ekonomi dicatat dua kali. Pencatatan dengan sistem ini disebut dengan istilah menjurnal. Dalam pencatatan tersebut ada sisi debet dan kredit. Sisi debet terletak di sebelah kiri sedangkan sisi kredit terletak di sebelah kanan. Setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan antara debet dan kredit. Persamaan akuntansi, untuk menjaga keseimbangan antara debet dan kredit harus memahami konsep persamaan akuntansi. Untuk dapat memahami persamaan akuntansi maka terlebih dahulu memahami elemen-elemen yang terdapat dalam laporan keuangan. Elemen-elemen tersebut terdiri dari asset, utang, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

*Aset*, Utang, dan *ekuitas* adalah elemen **neraca**, sedangkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan adalah elemen dari **laporan realisasi anggaran (LRA)**.

Dengan demikian persamaan akuntansi adalah elemen/pos-pos yang terdapat dalam neraca dan laporan realisasi anggaran.

## **b. Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Akuntansi adalah suatu sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas subsistem-subsistem atau kesatuan yang terdiri atas kesatuan yang lebih kecil, yang berhubungan satu sama lain dan mempunyai tujuan tertentu. Suatu sistem mengolah *input* (masukan) menjadi *output* (keluaran). Input sistem akuntansi adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir. *Output* –nya adalah laporan keuangan. Sistem akuntansi pemerintah daerah meliputi serangkaian proses ataupun prosedur, yang dimulai dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Karenanya untuk dapat memahami penyusunan laporan keuangan harus terlebih dahulu memahami sistem akuntansi sejak data direkam dalam dokumen.

**Tahap-tahap dalam siklus akuntansi** dimulai dari bukti transaksi, jurnal, posting ke buku besar, membuat neraca saldo, membuat jurnal penyesuaian, menyusun neraca saldo, membuat laporan keuangan, jurnal penutupan, dan neraca setelah penutupan.

**Bukti Transaksi**, transaksi-transaksi yang terjadi pertama-tama akan direkam dalam bentuk formulir sehingga formulir tersebut merupakan bukti.



Formulir ini dibagi menjadi formulir *internal*, yaitu formulir yang dibuat oleh organisasi yang bersangkutan dan formulir *eksternal*, yaitu formulir-formulir yang diterima dari luar organisasi. Jenis-jenis bukti yang digunakan dalam transaksi berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagian besar telah diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

**Bukti yang digunakan dalam penerimaan pendapatan antara lain:**

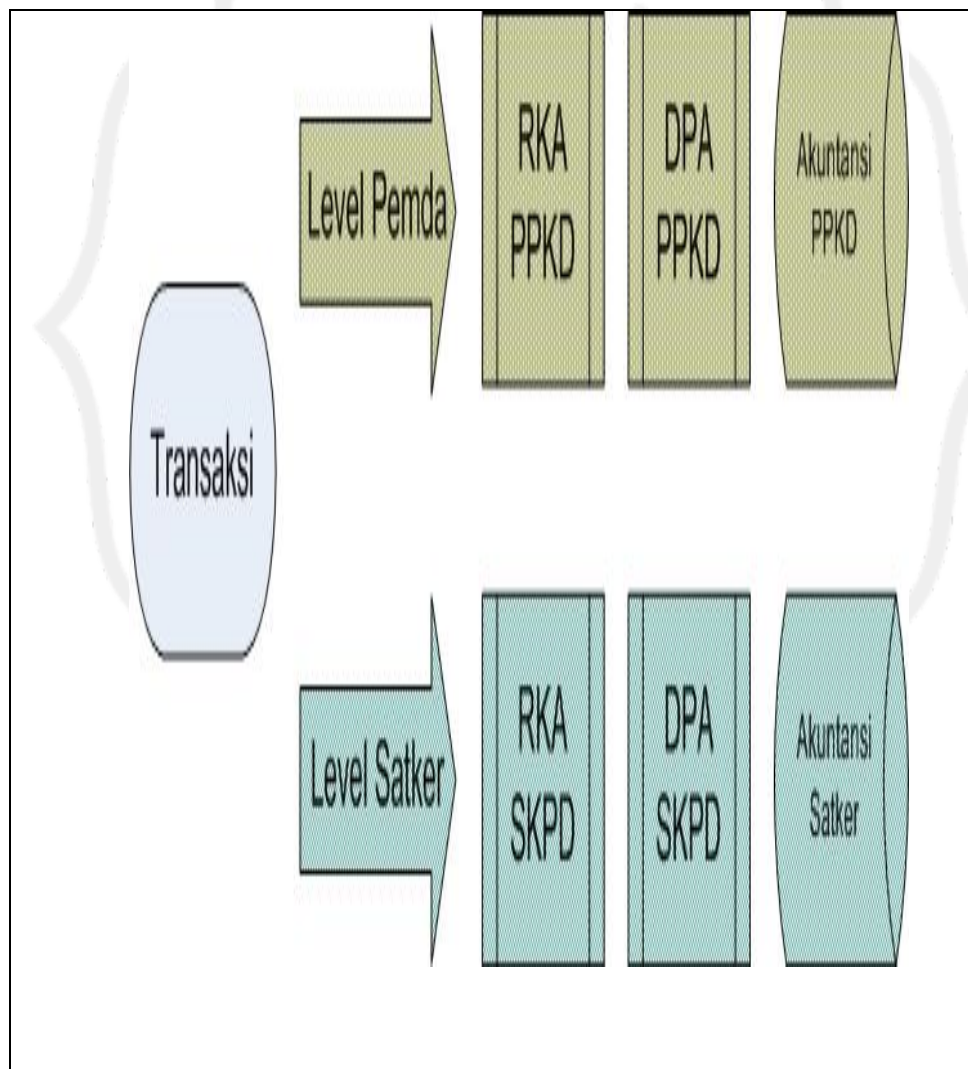
- 1). Surat Ketetapan Pejabat Daerah ( SKP- Daerah)
- 2). Surat Ketetapan Retribusi Daerah ( SKP- Retribusi)
- 3). Surat Tanda Setoran ( STS)
- 4). Bukti Setoran
- 5). Nota Kredit dari bank
- 6). Laporan penerimaan dari bendahara penerimaan
- 7). Bukti Penerimaan Kas
- 8). Surat perintah membayar atas penerimaan dana perimbangan
- 9). Rekening Koran.

**Bukti yang digunakan dalam pengelolaan belanja antara lain:**

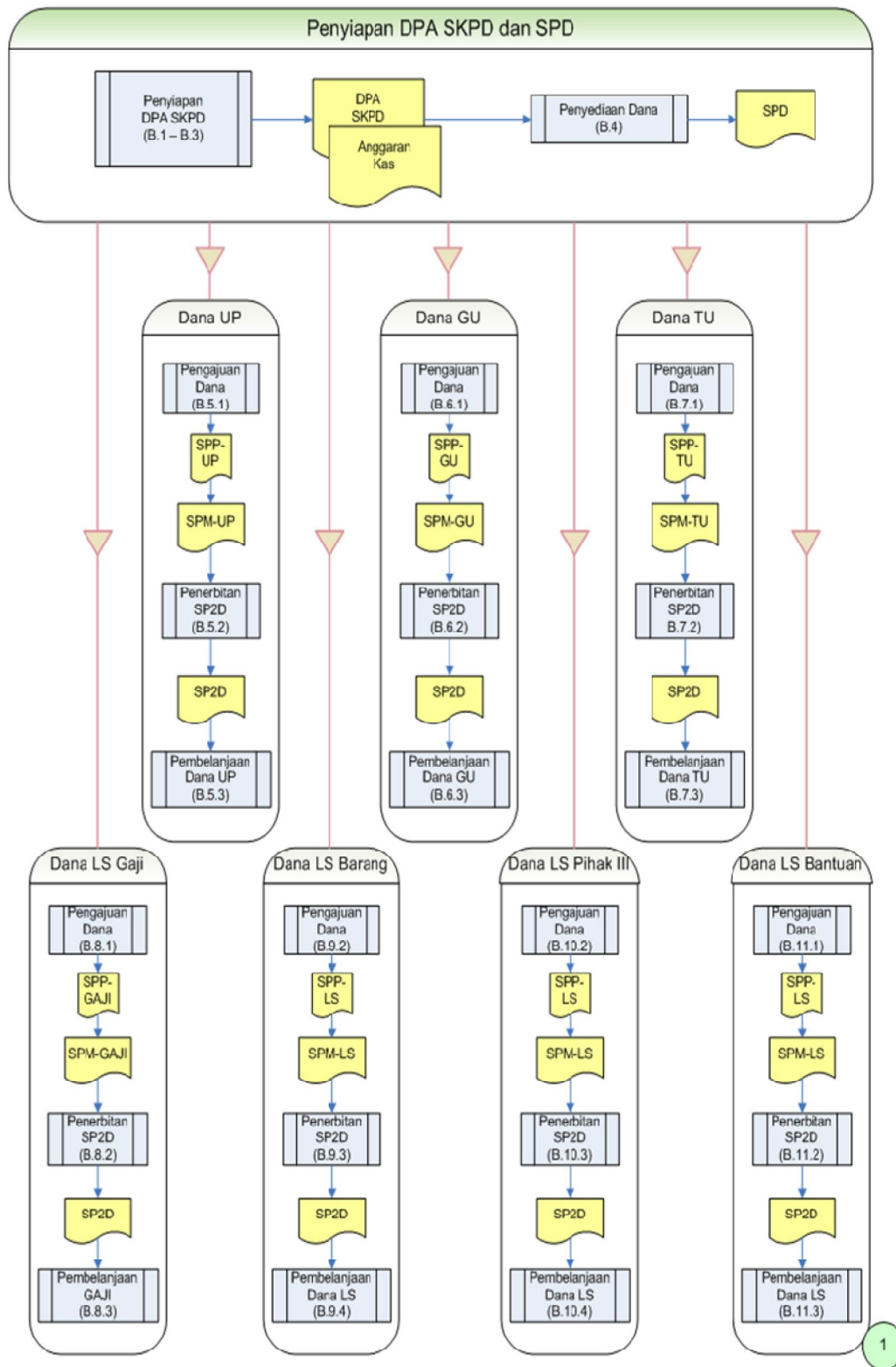
- 1). Surat perintah pencairan dana (SPP2D)
- 2). Surat perintah membayar (SPM)
- 3). Surat permintaan pembayaran (SPP)
- 4). Surat penyediaan dana (SPD)
- 5). BUkti pengeluaran kas
- 6). Nota debet bank

- 7). Surat perintah kerja
- 8). Surat perjanjian pemborongan
- 9). Bukti penagihan dari pihak ketiga
- 10). Berita acara penerimaan/penyerahan barang

### Transaksi di Pemda



### PELAKSANAAN dan PENATAUSAHAAN BELANJA



**Jurnal**, jurnal merupakan media/metode yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan. Jurnal disebut juga sebagai buku harian karena fungsi jurnal digunakan untuk melakukan pencatatan pertama dari transaksi-transaksi. Dalam jurnal transaksi keuangan diklasifikasikan menurut penggolongan yang sesuai dengan informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Karena merupakan sumber utama pencatatan ke rekening, jurnal sering disebut *the books of original entry* (catatan akuntansi permanen yang pertama). Dengan adanya jurnal, pencatatan kerekening menjadi lebih mudah, sebab jurnal sudah memilah-milahkan transaksi dengan debitan dan pengkreditan yang sesuai dengan rekening yang bersangkutan. Transaksi yang tidak mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran kas dicatat dalam jurnal umum. Transaksi yang mengakibatkan penerimaan kas dicatat dalam jurnal penerimaan kas, sedangkan transaksi yang mengakibatkan pengeluaran kas dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Penjurnalan dapat dilakukan secara harian dan bulanan. Jurnal dirancang sedemikian rupa sehingga menampung transaksi serta keterangan-keterangan yang menyertainya. Keberadaan jurnal dalam proses akuntansi tidak menggantikan peran rekening dalam mencatat transaksi, tetapi merupakan sumber untuk pencatatan ke rekening.

**Posting Ke Buku Besar**, Setelah dilakukan jurnal kemudian jumlah yang terdapat pada sisi debet dan kredit dipindahkan ditransfer ke rekening buku besar yang sesuai. Tindakan transfer ini disebut *posting*. *Posting* ke buku besar sekaligus merupakan penggolongan dan peringkasan transaksi sebab tiap-tiap data transaksi dibawa ke masing-masing rekening yang sesuai. Posting dapat dilakukan secara harian dapat juga dilakukan secara bulanan.

**Buku Besar** merupakan catatan akuntansi permanen yang terakhir, sehingga dikenal dengan *the books of final entry*. Buku besar adalah buku yang berisi kumpulan rekening, bertujuan mencatat secara terpisah atas pendapatan, belanja, pembiayaan, aktiva, utang, dan ekuitas dana. Untuk kelompok pendapatan ditemui rekening Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan yang sah, dan untuk belanja ditemui antara lain rekening belanja barang, belanja modal dan sebagainya. Untuk kelompok aktiva, misalnya akan dijumpai rekening kas untuk mencatat kas, rekening piutang untuk mencatat piutang pajak, piutang retribusi dan lain-lain, dan rekening tanah untuk mencatat tanah. Kelompok utang dijumpai rekening seperti utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Dalam kelompok ekuitas dana akan dijumpai antara lain, rekening *ekuitas* dana lancar dan *ekuitas* dana *investasi*. Rekening-rekening dalam buku besar tersebut apabila memerlukan rincian lebih lanjut maka rinciannya akan dibuat dalam Buku Pembantu. Buku Pembantu adalah buku yang digunakan untuk mencatat rincian dicatat dalam buku pembantu disebut rekening pengawas (*controlling accounts*). Sedangkan rekening-rekening yang merinci rekening pengawas disebut rekening pembantu (*subsidiary accounts*). Contoh buku pembantu adalah buku pembantu piutang, buku pembantu persediaan, buku pembantu aktiva-aktiva, dan sebagainya.

**Neraca Saldo** Prosedur penjurnalan dan *posting* dilakukan selama satu periode. Prosedur berikutnya adalah menyusun neraca saldo pada akhir periode akuntansi. Langkah dari penyusunan neraca saldo dilakukan dengan mengambil saldo terakhir yang ada di setiap rekening buku besar pendapatan, belanja,

pembiayaan, asset, utang dan ekuitas dana. Apabila jumlah debet lebih besar dari jumlah kredit lebih besar dari jurnal debet maka selisihnya adalah saldo kredit. Hasil penjumlahan neraca saldo harus menunjukkan angka yang sama atau keseimbangan jumlah debet dan kredit. Apabila tidak seimbang antara jumlah sisi debet dan kredit . Apabila tidak seimbang penjumlahan antara debet dan kredit kemungkinan kesalahan disebabkan :

1. Pada waktu melakukan penjumlahan tidak seimbang antara jumlah sisi debet dan kredit .
2. Kesalahan memindahkan angka saldo awal pada buku besar asset, kewajiban, dan ekuitas .
3. Kesalahan menuliskan angka pada waktu melakukan *posting*.
4. Kesalahan mendebitkan dan mengkreditkan pada waktu melakukan *posting*.
5. Kesalahan dalam menghitung saldo.
6. Terdapat transaksi jurnal yang tidak dipindahkan ke buku besar.

Angka-angka dalam neraca saldo dikatakan benar apabila pemindahan transaksi dari jurnal ke buku besar (*posting*) telah dilakukan dengan benar sesuai dengan rekening buku besar.

**Jurnal Penyesuaian**, tahap berikut dari siklus akuntansi adalah membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini dibuat karena angka-angka dalam neraca saldo disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya. Dalam akuntansi keuangan daerah jurnal penyesuaian yang dibuat yaitu :

1. Pendapatan pajak dan retribusi yang telah ditetapkan sampai dengan 31 Desember belum diterima.

2. Saldo persediaan barang per 31 Desember yang belum terpakai, seperti obat-obatan, barang cetakan, bahan bangunan, pupuk, dan sebagainya.
3. Biaya yang dibayar yang periodenya melewati tahun anggaran.
4. Pendapatan yang diterima di muka.
5. Kontruksi dalam pengerjaan yang belum dibayar.
6. Hutang jangka panjang yang jatuh tempo
7. Utang bunga
8. Kewajiban yang timbul karena bencana alam yang dananya telah disesiakan dalam APBD.
9. Piutang cicilan kepada pegawai karena penjualan/pengalihan kendaraan dinas dan rumah dinas
10. Penyusutan asset.

**Neraca Saldo Setelah Penyesuaian**, setelah jurnal penyesuaian dibuat, langkah berikutnya adalah mempostingnya ke rekening buku besar yang berhubungan. Setelah dilakukan posting prosedur akuntansi berikutnya adalah menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca Saldo Setelah Penyesuaian adalah neraca saldo yang disusun setelah pembuatan jurnal-jurnal penyesuaian. Saldo-saldo rekening setelah disesuaikan. Apabila dalam jurnal penyesuaian muncul rekening baru, maka rekening baru ini juga dimasukkan dalam neraca saldo setelah penyesuaian.

**Laporan Keuangan**, sesuai dengan siklus akuntansi, setelah penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian disusun laporan-laporan keuangan dengan

mengambil data neraca saldo setelah penyesuaian. Berdasarkan neraca saldo setelah penyesuaian maka dibuatlah :

1. Neraca
2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk membuat laporan arus kas dibuat berdasarkan data laporan realisasi anggaran ditambah dengan informasi saldo awal dan saldo akhir kas setara kas yang terdapat dalam neraca awal tahun dan neraca akhir tahun. Catatan atas laporan keuangan dibuat berdasarkan data neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan informasi lain yang berkaitan dengan laporan keuangan.

**Neraca Saldo Setelah Penutupan,** tahap ini akhir dari siklus akuntansi adalah penyusunan Neraca Saldo Setelah Penutupan. Neraca Saldo setelah penutupan berisai saldo rekening-rekening pendapatan, belanja, dan pembiayaan merupakan sebagian dari rekening ekuitas dana, sehingga pada akhir periode akuntansi atau akhir tahun anggaran, saldo-saldonya akan ditransfer ke rekening ekuitas. Rekening pendapatan, belanja, dan pembiayaan disebut rekening temporer (nominal) sedangkan rekening asset, utang, dan ekuitas dana disebut rekening permanen (real). Karena saldo rekening temporer dalam hal ini pendapatan, belanja, dan pembiayaan tidak berlanjut pada tahun berikutnya maka angka-angka rekening tersebut harus dinihilkan melalui jurnal penutup. Dengan adanya jurnal penutup rekening yang tetap ada adalah rekening permanen yaitu asset, utang dan ekuitas



dana. Untuk menihilkan rekening pendapatan, belanja, dan pembiayaan digunakan rumus sebagai berikut :

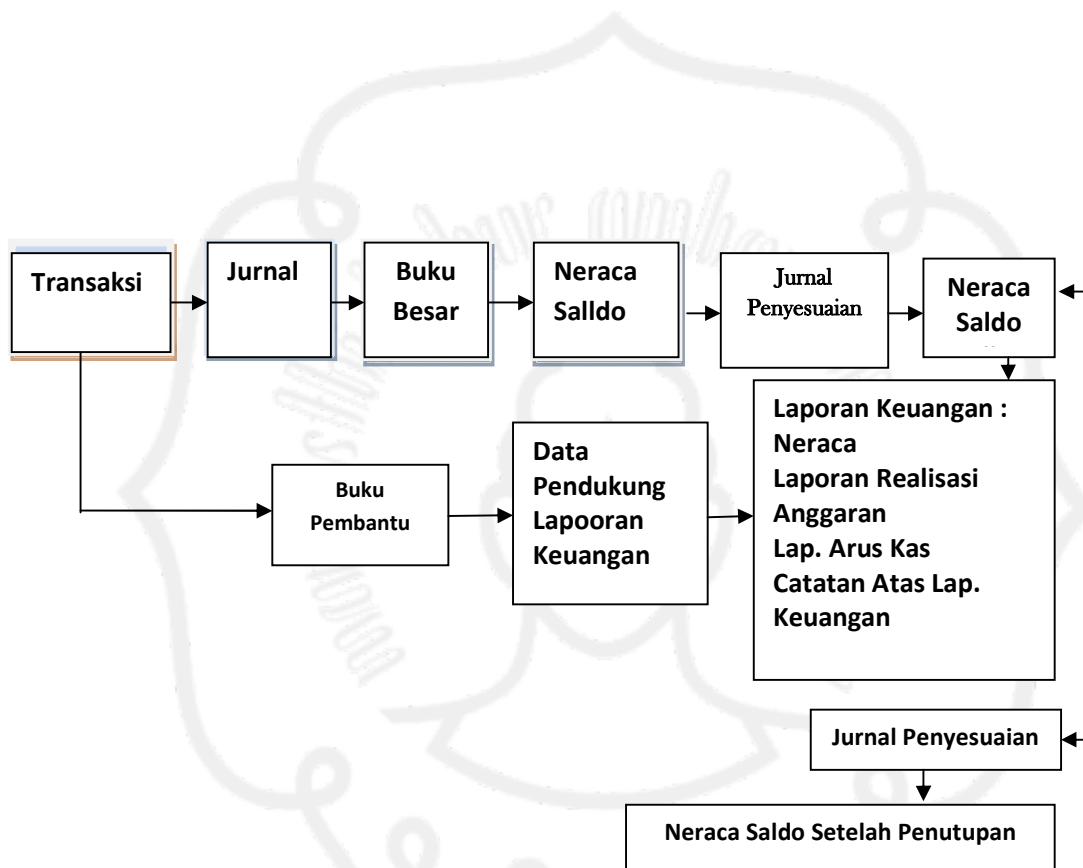
1. Karena pendapatan terletak pada sisi kredit maka untuk menihilkannya harus didebit, demikian halnya penerimaan pembiayaan.
2. Karena belanja terletak disisi debet maka untuk menihilkannya harus dikredit, demikian halnya pengeluaran pembiayaan.
3. Selisih antara antara pendapatan, penerimaan pembiayaan, belanja, dan pengeluaran pembiayaan merupakan silpa.
4. Karena APBDkita menganut surplus dan deficit maka posisi silpa kemungkinan debet dan kemungkinan kredit.

Rumus Jurnal Penutup yang dibuat :

Pendapatan	xxx	
Penerimaan Pembiayaan	xxx	
Silpa	xxx	
Belanja		xxx
Pengeluaran pembiayaan		xxx
Silpa		xxx

Membuat neraca saldo setelah penutupan saldo rekening nominal (pendapatan, belanja, dan pembiayaan) menjadi nihil dan rekening yang masih bersaldo adalah rekening-rekening real (permanen) meliputi harta, kewajiban, dan ekuitas dana. Saldo-saldo tersebut merupakan dana untuk neraca awal tahun berikutnya.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pemerintah daerah wajib menyajikan laporan keuangan dengan mengacu kepada SAP. Laporan keuangan yang wajib disusun terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).



Dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan dalam pasal 239 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan mengacu pada SAP. Dengan catatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tidak mengatur perubahan atas pasal 239 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Selanjutnya berdasarkan pasal 308 dan pasal 309 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah kepada Pemerintah Daerah, antara lain berupa pemberian pedoman.

### **c. Kebijakan Akuntansi**

Kebijakan Akuntansi pemerintah daerah adalah prinsip-prinsip, dasar, konvensi-konvensi, dan praktek-praktek spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah memuat ketentuan-ketentuan yang digunakan dalam penyusunan laporan seperti Pengertian, Klasifikasi, Pengakuan, Pengukuran, dan kepentingan lainnya yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan daerah seperti :

1. Basis Akuntansi yang dpergunakan dalam penyusunan laporan keuangan.
2. Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi ada pada tahapan kebijakan (*policy*). Tingkatan kebijakan (*policy*) berkaitan dengan masalah spesifik dalam penerapan standar yaitu misalnya :

1. Untuk Entitas mana standar diaplikasikan
2. Transaksi, peristiwa atau kejadian yang mana, dalam area umum, yang harus dicakup oleh standar.
3. Haruskah informasi itu menjadi subjek untuk audit .
4. Sejak tanggal berapa standar harus diaplikasikan (termasuk pertimbangan masa transisi)

Implementasi sistem akuntansi pemerintahan merupakan suatu kondisi yang menunjukkan kemudahan dan kemanfaatan sistem akuntansi pemerintahan sebagai pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Dari pengertian tersebut, maka implementasi sistem akuntansi pemerintahan terdiri dari dua dimensi yaitu: kemudahan dan kemanfaatan. Kemudahan dan kemanfaatan implementasi sistem akuntansi pemerintahan memungkinkan kebijakan akuntansi diterima semua pihak.

Sistem akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan dan dapat dijadikan pedoman dalam menyajikan informasi yang diperlukan berbagai pihak untuk berbagai kepentingan (*general purposes financial statements*), karena sistem akuntansi memberikan landasan tentang

prosedur, teknik, dan metode yang layak untuk merekam segala peristiwa penting kegiatan pemerintah.

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan (Hendriksen 2005). Tidak adanya sistem akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi negative berupa rendahnya reliabilitas dan objektivitas informasi yang di sajikan, dan inkonsistensi dalam pelaporan keuangan sehingga menyulitkan pemeriksaan (Jones dan Pandlebury 2000).

Implementasi sistem akuntansi pemerintahan , diharapkan mampu menjamin bahwa segala peristiwa penting kegiatan pemerintah terkam dengan baik dengan ukuran ukuran yang jelas dan dapat diiktisarkan melalui proses akuntansi dalam bentuk laporan dimana bisa diperiksa segala transaksi yang terjadi di dalam entitas itu, yakni entitas pemerintah. Sistem akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan (Hendriksen 2005). Adanya sistem akuntansi, pemeriksaan akuntansi dapat dilakukan secara efektif (Dunk dan Perera 1997).

Implementasi pengelolaan keuangan daerah merupakan sutau aktivitas yang mencakup ; tahap perencanaan, tahap pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah termasuk didalamnya bagaimana penatausahaannya, tahap pertanggungjawaban dan pengawasan.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka implementasi pengelolaan keuangan daerah terdiri: *planning, buget setting, activity of buget implementastion, buget monitoring control* dan *review*.

Penelitian Afiah (2004), salah satu kesimpulannya menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem informasi akuntansi, kualitas informasi keuangan berpengaruh terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Penelitian Bambang Pamungkas (2005) salah satu kesimpulan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi pengawasan dan kualitas laporan keuangan pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dalam Penelitian Abdul Rahman (2009), Hasilnya terbukti bahwa implementasi sistem akuntansi pemerintahan terdapat kinerja pemda terbukti, hal ini menunjukkan bahwa implementasi sistem akuntansi pemerintahan memberikan manfaat dan kemudahan bagi pemda dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan implementasi sistem akuntansi pemerintahan semua transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan Pemda terekam dengan baik dengan ukuran ukuran yang jelas dengan demikian Pemda dapat menyajikan laporan keuangan daerah yang baik. Hal ini sesuai dengan pendapat Jones dan Pendlebury (2000) dan Hendriksen et al. (2005).

Laporan keuangan daerah, dapat menggambarkan derajat kemajuan yang telah dicapai pemerintah daerah dalam menjalankan tugas, wewenang,

dan tanggung jawab yang dipercayakan. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh seberapa andal sistem akuntansi yang ditetapkan. Sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan kumpulan dari subsistem-subsistem yang didalam setiap subsistem tersebut terdapat tahap-tahap, prosedur, perangkat, dan data keuangan, kemudian mengolah data tersebut menjadi berbagai laporan keuangan untuk pihak luar maupun internal pemerintah daerah. Sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian tahap dan langkah yang harus dilalui dalam melakukan fungsi akuntansi tertentu. Sistem dan prosedur akuntansi yang terdapat di pemerintah daerah meliputi: Sistem dan procedure penerimaan kas, Sistem dan prosedur pengeluaran kas, sistem dan prosedur akuntansi selain kas dan sistem dan prosedur akuntansi asset.

Mahmudi (2007), Pengimplementasian sistem akuntansi pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, mendukung operasi rutin harian, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, meningkatkan akuntabilitas financial dan melindungi asset pemerintah daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, merupakan salah satu peraturan operasional dalam implementasi otonomi Daerah, setelah era reformasi tata kelola keuangan Negara/ daerah yang ditandai dengan disahkannya paket undang-undang bidang keuangan Negara. Peraturan Pemerintah ini telah mendorong daerah-daerah untuk melakukan perubahan dan perbaikan dalam manajemen dan pengelolaan keuangan daerah. Manajemen keuangan daerah yang sehat

diharapkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dibidang keuangan akan lebih teratur. Upaya ini harus mendapat dukungan dari semua pihak karena merupakan salah satu tuntutan reformasi yang menekankan pada upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Peraturan Pemerintah ini juga telah melahirkan regulasi baru sebagai aturan pelaksanaannya karena adanya pasal kunci dalam Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 yaitu pasal 54, “ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan Menteri Dalam Negeri”.

Lahirilah Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti Kepmendagri No. 29 tahun 2002 tentang *Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah*, serta Permendagri No. 13 Tahun 2006 ini merupakan pedoman umum bagi pemerintah daerah di dalam melaksanakan tata kelola keuangannya. Daerah harus menyusun aturan pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik daerah, dalam bentuk Perda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan berbagai Peraturan Kepala Daerah terkait dengan implementasinya. Ada beberapa hal mendasar yang berubah dari Kepmendagri No. 29 tahun 2002 ke Permendagri Nomor .13 Tahun 2006 yakni :

- a. Dari Sentralisasi ke Desentralisasi. Desentralisasi dalam hal ini adalah memberikan kewenangan kepada SKPD sebagai pejabat Pengguna Anggaran ( PA) dan Pengguna Barang (PB). Sebagai PA, kepala SKPD



boleh *memerintahkan* BUD untuk melakukan pembayaran dengan mengeluarkan SPM (Surat Perintah Membayar), untuk melakukan pembayaran dengan kepala SKPD dengan BU, maka dibentuklah dokumen Anggaran Kas. Anggaran Kas tidak ubahnya sebuah kontrak antar BUD dan Kepala SKPD, dimana BUD memiliki kewajiban untuk menerbitkan SP2D maksimal sebesar nilai yang tercantum dalam anggaran kas tersebut. Oleh karena itu, kepala SKPD tidak perlu membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) atas anggaran yang telah digunakannya ke BUD.

- b. Perubahan Struktur organisasi organisasi PKD. Implikasi dari penerapan asa desentralisasi di atas adalah terjadinya perubahan dalam struktur PKD. Kepala SKPKD adalah PPKD yang juga melaksanakan fungsi perbendaharaan keuangan daerah (selaku BUD), sehingga memiliki kewenangan untuk mengusulkan bendahara yang akan ditempatkan di SKPD sebagai pejabat fungsional perbendaharaan. Di sisi lain, di SKPD ditunjuk pejabat penatausahaan keuangan (PPK) SKPD, yang akan melaksanakan fungsi verifikasi, akuntansi, dan pembuatan SPM.
- c. Mengenalkan istilah Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi. SKPKD adalah entitas pelaporan, sedangkan SKPD adalah entitas akuntansi ( yang wajib menyampaikan laporan keuangan yang terdiri dari LRA, neraca dan catatan atas laporan keuangan *hanya* kepada entitas pelaporan). Kepala SKPD tidak menyusun Laporan Arus Kas karena bukan merupakan pengguna uang (kas), kecuali sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang. Pengguna kas di

SKPD adalah bendahara, yang membuat buku kas umum (BKU). Pengisian BKU bukan merupakan bagian dari proses akuntansi keuangan daerah.

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, berbagai peraturan serta perundang-undangan tersebut diatas diharapkan dapat dijadikan landasan yang kokoh bagi pengelola keuangan Negara dalam rangka menjadikan good governance dan clean government .

Reformasi pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian terintegrasi dengan pengelolaan keuangan Negara merupakan hal yang harus diterima dan diterapkan oleh pemerintah daerah. Pelaporan dan pertanggungjawaban mengalami perubahan yang besar. Bentuk Laporan pertanggungjawaban sebelumnya hanya berupa laporan perhitungan APBD, saat ini laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan. Laporan Keuangan tersebut merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) .

#### **4. Akuntabilitas dan Transparansi**

Secara sederhana akuntabilitas (accountability) mengandung arti sebagai pertanggung jawaban. Apabila dilihat dari aspek akuntansi dan manajemen pemerintah, Tim Studi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP) mendefinisikan sebagai perwujudan

kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan saran-saran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik (Rosjidi, 2001).

Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja financial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi dan hak untuk didengar aspirasinya (Mardiasmo, 2002).

*Governmental Accounting Standart Board (GASB) dalam Concepts Statement No1 tentang Objectives of Financial Reporting* menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar dari pelaporan keuangan pemerintah. Akuntabilitas adalah tujuan tertinggi pelaporan keuangan pemerintah. Terdapat keterkaitan yang jelas antara akuntabilitas dan pelaporan keuangan. Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas seluruh aktivitas yang dilakukan, bukan hanya aktivitas *financialnya* saja. Concep No.1 menekankan bahwa laporan keuangan pemerintah harus dapat memberikan informasi yang dibutuhkan para pemakainya dalam pembuatan keputusan ekonomi, social dan politik.

Beberapa bentuk dimensi pertanggungjawaban public oleh pemerintah daerah disampaikan oleh Ellwood, 1993 (Mardiasmo, 2001), yaitu terdapat empat bentuk akuntabilitas public :

1) Akuntabilitas hukum dan peraturan (*Assoutability for probility and legality*).

Terkait denngan jaminan adanya kepatuhan terdapat hokum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana public. Untuk menjamin dilaksanakannya akuntabilita hokum dan peraturan oleh pemerintah daerah, maka perlu dilakukan audit kepatuhan (*compliance audit*).

2) Akuntabilitas Proses

Terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik. Akuntabilitas proses dalam pemerintahan daerah dapat diwujudkan melalui pemberian pelaayanan publik yang cepat, responsive dan murah dari sudut biaya. Audit terdapat akuntabilitas proses untuk memeriksa ada tidaknya mark up dan pungutan-pungutan lain diluar yang ditetapkan, serta sumber-sumber inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahalnya biaya pelayanan public dan kelambatan dalam proses pelayanan tersebut.

3) Akuntabilitas Program

Terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat di capai atau tidak dan apakah pemerintah daerah telah memertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal.

#### 4) Akuntabilitas Kebijakan

Teerkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah terdapat kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah daerah sebagai eksekutif kepada DPRD sebagai legislative dan masyarakat luas.

Afandi (2001) mengemukakan bahwa akuntabilitas keuangan adalah kewajiban pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas yang berkaitan dengan penerimaan dan penggunaan uang public kepada pihak-pihak yang memiliki hak wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut, yakni DPR/DPRD dan masyarakat umum. Sehingga aspek-aspek penting yang harus diperhatikan dalam aktivitas keuangan adalah :

- a. Aspek legalitas penerimaan dan pengeluaran, artinya setiap transaksi yang terjadi harus dapat dilacak otoritasnya.
- b. Adanya pengelolaan keuangan secara baik, perlindungan terhadap asset fisik dan financial serta mencegah terjadinya pemborosan dan salah arus.

Agar pengelolaan dana masyarakat dapat dilaksanakan secara lebih transparan, ekonomi, efisien, efektif, akuntabel dan berorientasi pada kepentingan public kiranya pemerintah daerah harus menggunakan konsep *value for money*, hingga akhirnya terwujud akuntabilitas public. Konsep value for money yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengelola dana masyarakat pada dasarnya mencakup tiga elemen penting yaitu :

- a. Ekonomis, mengukur sejauh mana pemerintah daerah dapat menggunakan sumber daya masukan (*input resources*).
- b. Efisiensi, mengukur sejauh mana pemerintah dapat mencapai keluaran optimal dengan sumberdaya masukan seminimal mungkin (*output/ input*).
- c. Efektifitas, mengukur sejauh mana pemerintah daerah berhasil mencapai target yang ditetapkan.

Konsep *value for money*, sangat penting bagi pemerintah sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat karena pemakaian konsep tersebut akan member manfaat berupa :

- a. Efektifitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan tepat sasaran.
- b. Meningkatkan mutu pelayanan public
- c. Dengan menghilangkan setiap inefisiensi dalam seluruh tindakan pemerintah maka biaya pelayanan yang diberikan menjadi murah dan pemerintah maka biaya pelayanan yang diberikan menjadi murah dan selalu dilakukan penghematan dalam pemakaian sumber daya.
- d. Alokasi belanja yang berorientasi pada kepentingan public.
- e. Meningkatkan *public cost awareness* sebagai akar akuntabilitas publik.

Menurut Douglas ( dalam Nurkholis, 2000) , dalam bukunya berjudul ”*Governmental and Nonprofit Organization : Theory and Practices*” menyatakan bahwa *accountability* mempunyai tiga fungsi :

- a. Menyajikan informasi mengenai keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang diambil selama beroperasinya suatu *entitas* (satuan usaha) tersebut.
- b. Memungkinkan pihak luar (misalnya legislative, auditor dan masyarakat luas) untuk mereview informasi tersebut.
- c. Mengambil tindakan *korektif* jika dibutuhkan.

Jenis Akuntabilitas menurut Mardiasmo (2002) mengkategorikan akuntabilitas menjadi 2 (dua) macam yaitu :akuntabilitas vertikal (*vercal accountability*) dan akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*). Sedangkan Rosjidi (2001) menyebutkan kedua akuntabilitas tersebut sebagai : akuntabilitas internal (*internal Accountability*) dan akuntability eksternal (*ekternal accountability*).

Akuntabilitas vertical (internal) merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, yang berlaku bagi setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggara Negara termasukpemerintah. Setiap pejabat atau petugas public baik individu ataupun kelompok secara hirarki berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan langsung secara *build in* mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatannya periodic maupun sewaktu-waktu bila diperlukan . Misalnya pertanggung jawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

Akuntabilitas horizontal (eksternal) melekat pada setiap lembaga Negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangannya untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal (masyarakat luas) dan lingkungan (*publik or external accountability an environment*). Laporan keuangan pemerintah merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen pemerintah untuk memberikan informasi kepada masyarakat, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Meskipun demikian, informasi keuangan bukan merupakan tujuan akhir akuntansi di pemerintah. Selama ini akuntansi identik dengan pelaksanaan *akuntabilitas financial* saja. Tantangan yang dihadapi akuntansi pemerintah adalah mampukah akuntansi menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memonitor akuntabilitas manajemen, akuntabilitas politik, dan akuntabilitas kebijakan.

Pelaporan keuangan pemerintah dapat dilihat dari : segi akuntabilitas, manajerial, transparansi, kesinambungan antara generasi Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan yang dipercaya kepada unit organisasi pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan pemerintah secara periodic. Manajerial adalah menyediakan informasi yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta memudahkan pengendalian yang efektif atas seluruh aset, hutang dan ekuitas dana. *Transparansi* adalah menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah



yang baik, laporan pertanggungjawaban merupakan hasil dari proses akuntansi dari transaksi pemerintah. Laporan pertanggungjawaban umum terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Kesenambungan antara penerimaan pemerintah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk mengambil keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan untuk mendukung pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik tersebut meliputi informasi yang digunakan untuk membandingkan kinerja keuangan actual dengan yang dianggarkan, menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi, membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya, serta membantu dalam mengevaluasi efisiensi dan efektifitas (Mardiasmo, 2006).

### **C. Hipotesis**

#### **1. Hubungan antara faktor organisasional dan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.**

Penelitian yang dilakukan Sabeni dan Latifah (2007), tentang Faktor-faktor Keperilakuan Organisasi Dalam Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berdasarkan hasil bahwa dari faktor organisasi yang diuji, hanya dukungan atasan yang berpengaruh untuk meningkatkan kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Pengaruh Pelatihan dan Kejelasan atas Tujuan terhadap kegunaan Sistem Akuntansi

Keuangan Daerah tidak berhasil dibuktikan. Konflik Kognitif tidak berhubungan positif dengan kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Konflik Afektif berhubungan negative dengan kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Penelitian ini mendukung dari penelitian Chenhall (2004) dimana factor konflik afektif berhubungan dengan kegunaan sistem ABCM. Hubungan tidak langsung antara faktor organisasional dengan sistem yang dimediasi dengan konflik kognitif ada perbedaan yang sangat kecil. Dan saran untuk peneliti lanjutan dengan lebih banyak dan tidak terbatas pada Dinas dan kantor dan Badan Pengelola Keuangan Daerah saja. Namun diperluas untk seluruh Dinas di Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Kota. Perlu dilakukan pengembangan instrumen yaitu disesuaikan denga kondisi dan lingkungan dari objek yang dteliti.

Chenhall (2004) dalam penelitiannya tentang peran kognitif dan afektif dalam implementasi ABCM menunjukkan bahwa faktor perilaku selama implementasi sangat berpengaruh signifikan terhadap kegunaan ABCM pada perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengimplementasian sistem baru, perlu dipertimbangkan faktor-faktor organisasional seperti komitmen dari sumber daya yang terlibat, dukungan atasan, kejelasan tujuan dan pelatihan. Dari beberapa penelitian tersebut dapat dijadikan dasar untuk membangun Hipotesis sebagai berikut :

H1a : Pelatihan berhubungan positif dengan kegunaan Sistim Akuntansi Keuangan Daerah

H1b : Kejelasan Tujuan berhubungan positif dengan kegunaan Sistim Akuntansi Keuangan Daerah

H1c : Dukungan Atasan berhubungan positif dengan kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

## **2. Hubungan antara faktor organisasional dalam Implementasi dengan Konflik Kognitif dan Afektif.**

Penelitian ini menggunakan tiga dimensi faktor organisasional dalam implementasi yang akan diuji meliputi dukungan atasan, kejelasan tujuan dan pelatihan. Memaksimalkan konflik kognitif dan meminimalkan konflik afektif selama implementasi dapat dilakukan apabila terjadi beberapa kondisi berikut terdapat keanekaragaman kemampuan dan orientasi, didukung oleh suatu komitmen, dibangun hubungan yang baik dalam tim untuk bekerjasama setiap waktu (Amason, 1996 dalam Chenhall, 2004). Perhatian terhadap faktor organisasional dapat mengembangkan kondisi ketiga hal tersebut sehingga akan meningkatkan konflik kognitif dan meminimalkan konflik afektif.

H2a : Pelatihan berhubungan positif dengan konflik kognitif

H2b : Kejelasan Tujuan berhubungan positif dengan konflik kognitif

H2c : Dukungan Atasan berhubungan positif dengan konflik kognitif

H3a : Pelatihan berhubungan positif dengan konflik afektif

H3b : Kejelasan Tujuan berhubungan positif dengan konflik afektif

H3c : Dukungan Atasan berhubungan positif dengan konflik afektif

## **3. Konflik Kognitif dan Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.**

Konflik kognitif dapat bermanfaat untuk memecahkan masalah dan mendorong ke arah perbaikan pengambilan keputusan. Manfaat yang dapat diperoleh dari konflik kognitif berasal dari potensinya untuk menyediakan kesempatan untuk interaksi dengan *dialectically style*, berdebat, mempertahankan argument yang dimiliki melawan argument lain dalam organisasi (Mitroff dan Emsthoff, 1979; Janis, 1982; Schweiger dan Sandrrg, 1989 dalam chenhall, 2004) . Penelitian terdahulu mengenai konflik kognitif telah dilakukan Chanhall (2004) dengan kesimpulan bahwa ada hubungan positif antara konflik kognitif dengan kegunaan ABCM . Oleh karena itu dikembangkan hipotesis sebagai berikut :

H4 : Konflik kognitif berhubungan positif dengan kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

#### **4. Konflik Afektif dan Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.**

Konflik Afektif cenderung melibatkan persepsi yang mengancam posisi seseorang di dalam suatu kelompok, pertikaian, frustrasi dan friksi antara pribadi seseorang dengan nilai dan norma yang ada (Petersen, 1983; Ross, 189 dan Amason, 1996 dalam Chenhall, 2004), konsekuensi yang tidak diinginkan dari konflik Afektif diantaranya memperlambat komunikasi dan proses kognitif, mengurangi mengurangi kekohesifan kelompok dalam menerima ide baru, dan usaha saling menjatuhkan di antara para manajer (Robin, 1989 dan Pelled, 1996). Beberapa kasus yang terdapat dalam penelitian Chenhall (2004) mengenai implementasi ABCM, konflik afektif ini berpotensi dapat mengurangi kegunaan ABCM untuk perencanaan produk dan manajemen biaya. Hipotesis penelitian sebagai berikut :

H5 : Konflik Afektif berhubungan negative dengan Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

#### **5. Hubungan antara Faktor Organisaional, Konflik Afektif dan Kriteria Hasil dalam meningkatkan kegunaan Sistem akuntansi Keuangan Daerah.**

Apabila dalam Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memperhatikan faktor organisasional seperti dukungan atasan, kejelasan tujuan dan pelatihan diharapkan akan dapat memaksimalkan konflik kognetif dan konflik afektif sehingga diharapkan dapat menghasilkan hasil yang diharapkan yaitu pengelolaan keuangan yang transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel. Hipotesis yang akan diuji adalah :

H6 : Faktor Oganisasi seperti pelatihan, kejelasan tujuan dan dukungan atasan dapat meningkatkan konflik kognetif yang pada gilirannya akan meningkatkan Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

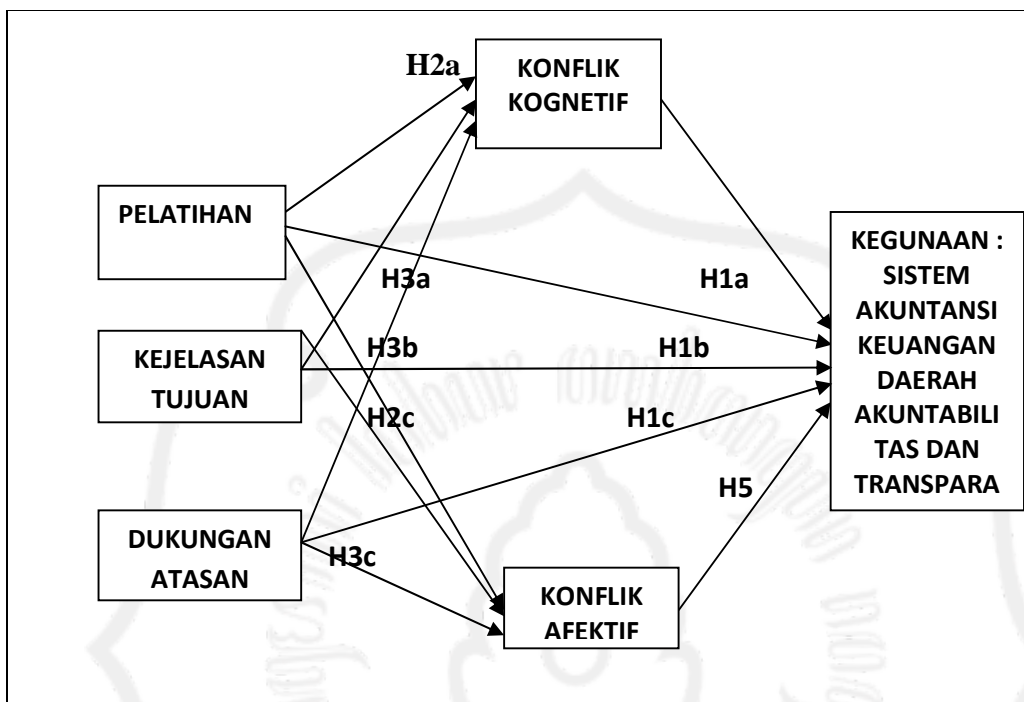
H7 : Faktor organisasional seperti pelatihan, kejelasan tujuan dan dukungan atasan dapat menurunkan konflik afektif yang pada gilirannya akan meningkatkan kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

#### **D. Kerangka Pemikiran Teoritis.**

Gambaran berikut ini menyajikan model mengenai hubungan antara faktor keperilakuan organisasi dengan Implementasi (pelatihan,kejelasan tujuan dan dukungan atasan) dengan *variabel intervening* kognetif dan afektif konflik akan meningkatkan Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yaitu meliputi transparansi dan akuntabilitas dapat digambarkan berikut :

**Gambar : 2**

**MODEL KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS  
FAKTOR KEPERILAKUAN ORGANISASI TERHADAP KEGUNAAN  
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH  
DI SUBOSUKAWONOSRATEN**



BAB III

METOD

E

PENELI

TIAN

A.

Desain

Penelitian

n

D

esain Penelitian yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan *Structural Equation Model* (SEM). Penelitian ini akan mengukur bagian yaitu (1) pengaruh factor organisasional dalam implementasi (pelatihan, kejelasan tujuan, dukungan atasan) melalui *variabel Intervening* konflik kognitif dan afektif terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah, dan (2) pengaruh langsung antara faktor organisasional (pelatihan, kejelasan tujuan, dukungan atasan) terhadap kegunaan Sistem Akuntansi keuangan daerah. Teknik analisis jalur ini menggunakan program Analisis Of Moment Structure (AMOS 16.0)

## B. Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer yang bersumber dari jawaban responden atas pertanyaan yang berhubungan dengan faktor berperilaku terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah SUBOSUKAWONOSRATEN. Data Penelitian ini dikumpulkan dengan cara mengirim kuesioner ke responden secara langsung.

### **C. Populasi dan Sampel.**

Populasi dari Penelitian ini Pengelola SKPD di Pemerintah Daerah SUBOSUKAWONOSRATEN (Kotamadya Surakarta, Kabupaten Boyoolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar Kabupaten Sragen, Kabupaten Klaten) terdiri 1 kota dan 6 Kabupaten. Data Responden Pengelola Keuangan SKPD di masing-masing Kotamadya dan Kabupaten sebagaimana dalam lampiran.

#### **1. Devinisi Operasional dan Teknik Pengukuran**

- a. Variabel Faktor Perilaku Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Variabel faktor organisasi ada tiga aspek, meliputi dukungan atasan, kejelasan, dan pelatihan. Dukungan atasan artinya sebagai keterlibatan manajer dalam kemajuan proyek dan menyediakan sumber daya yang diperlukan. Kejelasan tujuan didefinisikan sebagai kejelasan dari sasaran dan tujuan digunakan sistem akuntansi keuangan daerah di semua level organisasi. Sedangkan pelatihan merupakan suatu usaha pengarahan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman mengenai sistem (Chenhall, 2004)

Faktor organisasional terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah diukur dengan menggunakan 9 item instrument yang dibangun oleh Shield dan Young (1989) dan Shield (1995) yang dimodifikasi. Skor dari item dari 1 = Sangat Tidak Sesuai hingga 5 = Sangat Sesuai.

b. Konflik Kognitif dan Afektif

Konflik merupakan kesenjangan antara ide individu dan lawannya. Hal ini seringkali dihubungkan dengan situasi dimana sumber daya yang tersedia terbatas sehingga individu organisasi berusaha saling menghalangi tercapainya tujuan dari yang lain (Robbins, 1989). Menurut Swihart dan Schweiger berpendapat bahwa konflik disatu pihak dapat meningkatkan kualitas keputusan, namun dilain pihak dapat menurunkan kemampuan individu untuk kerjasama. Konflik yang mempunyai efek menguntungkan disebut konflik kognitif sedangkan yang menimbulkan penyimpangan disebut konflik afektif (Amason dan Schweiger, 1994). Konflik kognitif dan afektif diukur dengan menggunakan 6 item yang dikembangkan oleh Jehn (1994) dan digunakan oleh Jehn (1994) dan Amason (1996). Skala 1 = Sangat Tidak Sesuai hingga 5 = Sangat Sesuai.

c. Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Adapun Kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah ini diharapkan dapat memenuhi tuntutan dari masyarakat tentang transparansi dan akuntabilitas dari lembaga sector public. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dapat berguna untuk mengelola dana secara transparan, ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel. Pengukuran kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah berdasarkan item yang



dikembangkan dengan memodifikasi instrument yang digunakan oleh Chenhall (2004) dan disesuaikan dengan kegunaan sistem keuangan daerah.

#### D. Analisa Data

##### 1. Untuk pengumpulan data menggunakan kuesioner .

Kuesioner tersebut didistribusikan langsung oleh peneliti kepada responden. Jumlah Kuesioner yang dikirim kepada responden sebanyak 511 kuesioner.

##### 2. Pre-Test

Dalam penelitian ini juga penulis melakukan uji pendahuluan atau pre-test terhadap ukuran-ukuran variabel. Pengujian pendahuluan lebih difokuskan pada validitas isi yaitu validitas tampak. Hal ini hubungan dengan penggunaan aplikasi PLS yang memungkinkan peneliti melakukan pengujian model pengukuran pengukuran dan model structural secara bersamaan dan dalam satu waktu yang sama.

Kuesioner penelitian yang telah disusun diujikan kepada 7 (tujuh) orang mahasiswa Magister Akuntansi Universitas Sebelas Maret Surakarta. Mahasiswa tersebut jurusan akuntansi konsentrasi sektor publik yang masing-masing bekerja di Pemerintah Daerah Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Klaten. Selain diminta untuk mengisi kuesioner tersebut mereka diminta untuk memberikan masukan atas kuesioner tersebut.

Mulai dari redaksional kuesioner sampai dengan pemahaman mereka atas konstruk yang diukur oleh item-item pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner tersebut. Penyampaian kuesioner dilakukan secara personal sehingga peneliti dapat menggali sebanyak mungkin masukan-masukan. Dari mereka.

### 3. Uji Kualitas Data dan Uji realibilitas data

Uji kualitas data uji ralibilitas data dilakukan dengan melihat nilai Cronbrach Alpha ( $\alpha$ ) dari variable yang diteliti. Pengujian validitas Corelasi Product Moment dengan menggunakan Program SPSS 12,0. Uji Asumsi Model Asumsi-asumsi untuk terpenuhinya pada pengujian model analisis path atau analisis jalur adalah sebagai berikut :

#### a. Ukuran sampel

Sampel minimum yang diharapkan dapat kembali minimal 100 eksemplar, sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan untuk analisis data menggunakan *Structural Equation Model* (SEM) Hair et al., (1998). Jumlah tersebut telah mencukupi sebagai ukuran sampel untuk kepentingan analisis.

#### b. Uji normalitas data

*Assesment of normality* merupakan *output* untuk menguji apakah data kita normal secara *multivariate* sebagai syarat asumsi yang harus dipenuhi

dengan *Maximum Likelihood*. Jika data normal secara multivariate. Solusi yang harus dilakukan adalah melakukan transformasi data dengan bentuk fungsi lainya seperti logaritma atau akar kuadrat untuk mendapatkan data distribusi normal. Berbagai macam *statistic non parametric* mengemukakan aturan yang harus dilakukan bahwa analisis data tidak dapat dilanjutkan apabila data tidak berdistribusi normal. Namun sekarang terdapat *perspektif* baru di dalam *estimasi* untuk *variabel metric*. Pendekatan *non parametric* dikenal dengan *resempling* (Hair et.al, 1998). *Resempling* dapat dilakukan dengan menggunakan kekuatan komputasi untuk mengukur nilai parameter dari sampling. Metode yang digunakan untuk *resampling* yaitu dengan bootstrap. Apabila data yang diperoleh dalam penelitian ini tidak berdistribusi normal, maka peneliti menggunakan fasilitas *bootstrap*.

#### d. Evaluasi Outlier

Mahalanobis distance untuk mengukur apakah data ada yang outlier yaitu mendeteksi apakah sekor observasi ada yang jauh berbeda dengan skor centroid .Pengujian terhadap multivariate outlier dievaluasi dengan Chi Square. Mahalanobis d-squared digunakan untuk mengukur jarak skor hasil observasi terhadap nilai centroidnya. Arbuckle (1997) mencatat bahwa walaupun nilai p diharapkan lebih kecil , tetapi apabila nilai kecil menunjukkan observasi yang jauh dari nilai centroidnya dan dianggap outlier serta harus dibuang (didrop) dari analisis. Hasil pengolahan data dengan menggunakan AMOS 16.0 .

e. Evaluasi Multicollinearity atau Singularity

Evaluasi Multicollinearity atau Singularity dilakukan dengan melihat determinan matrik kovarian. Pengujian data menggunakan AMOS 16.0



**BAB IV**

**ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

**A. Hasil Observasi**

**1. Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner**

Penelitian ini menggunakan data primer yang bersumber dari jawaban responden atas pertanyaan yang berhubungan dengan faktor berperilaku terhadap kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di SUBOSUKAWONOSRATEN. Data Penelitian ini dikumpulkan dengan cara mengirim kuesioner ke responden secara langsung. Populasi Penelitian ini Semua Pengelola Keuangan SKPD di

Pemerintah Daerah SUBOSUKOWONOSRATEN (Kotamadya Surakarta, Kabupaten Boyoolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Klaten) terdiri 1 kota dan 6 Kabupaten.

Untuk pengumpulan data menggunakan kuesioner . Kuesioner tersebut didistribusikan langsung oleh peneliti kepada responden. Jumlah Kuesioner yang dikirim kepada responden sebanyak 511 kuesioner ditunjukkan dalam tabel 1.

Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden dimasing-masing Dinas SKPD yaitu 1 (satu) Pemerintah Daerah Kota dan 6 (enam) Kabupaten di SUBOSUKOWONOSRATEN bulan yang dimulai pada tanggal 01 Maret 2009 – 30 Mei 2009.

**Tabel 1**  
**Data Kuesioner Yang Dikirim Ke Responden**

<b>NO</b>	<b>NAMA PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Kota Surakarta	73 eksemplar
2	Kabupaten Boyolali	73 eksemplar
3	Kabupaten Sukoharjo	73 eksemplar
4	Kabupaten Wonogiri	73 eksemplar
5	Kabupaten Karanganyar	73 eksemplar
6	Kabupaten Sragen	73 eksemplar
7	Kabupaten Klaten	73 eksemplar
	<b>Total</b>	<b>511 eksemplar</b>

Kuesioner yang disebarakan sejumlah 511 eksemplar dan yang dikembalikan sejumlah 427 eksemplar, dengan tingkat *esponse rate* sebesar 83,56%. Ditunjukkan dalam tabel..2.

**Tabel 2**  
**Rincian Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner**

2.	KETERANGAN	JUMLAH	PROSENTASE
	Kuesioner yang didistribusikan	511 eksemplar	100 %
	Kuesioner yang diterima (kembali)	(427) eksemplar	83,56 %
	Kuesioner yang tidak kembali	84 eksemplar	16,44 %
	Kuesiner yang gugur (tidak lengkap pengisiannya) sehingga tidak dapat diolah	20 eksemplar	3,91 %
	Kuesioner yang lengkap Yang Diolah	407 eksemplar	79,65 %
	Tingkat Pengembalian ( <i>Respons Rate</i> )	$(427/511)*100\%$	83,56 %
	Tingkat Pengembalian yang bisa digunakan ( <i>Usable Response Rate</i> )	$(407/511)*100\%$	79,65 %

### Gambaran Umum Responden

Mayoritas responden berjenis kelamin pria (58.72 %) ditunjukkan dalam tabel

3.

**Tabel . 3**

### Jenis Kelamin Responden

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Pria	239	58,72 %
2	Wanita	168	41,28 %

<b>Total</b>	<b>407</b>	<b>100 %</b>
--------------	------------	--------------

Yang

memiliki latar belakang pendidikan setara Sarjana 45,95% ditunjukkan di tabel 4

**Tabel . .4**

**Tingkat Pendidikan Responden**

<b>NO</b>	<b>PENDIDIKAN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>PERSENTASE</b>
1	SLTA	72	17,69 %
2	D III	90	22,11 %
3	S1	187	45,95 %
4	S2	58	14,25 %
5	S3	-	-
<b>Total</b>		<b>407</b>	<b>100 %</b>

Lama bekerja dari responden bervariasi dan seimbang antara yang sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun 35,14% dan yang bekerja kurang dari 5 tahun sekitar 16,46% ditunjukkan dalam tabel .5

**Tabel. 5**

**Lama Bekerja Responden**

<b>NO</b>	<b>LAMA BEKERJA</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>PERSENTASE</b>
1	0 - 5 tahun	67	16,46 %
2	6 - 10 tahun	92	22,60 %
3	11 – 15 tahun	105	25,80 %
4	Diatas 15 tahun	143	35,14 %
<b>Total</b>		<b>407</b>	<b>100</b>

### 3. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Pengolahan data untuk menggambarkan statistik deskriptif variabel penelitian ini menggunakan SPSS versi 12.0 yang disajikan dalam tabel 6

**Tabel .6**  
**Statistik Deskriptif Variabel**

<b>Variabel Penelitian</b>	<b>N</b>	<b>Mean</b>	<b>Std. Deviation</b>
Dukungan Atasan	407	21.1450	2.86668
Kejelasan Tujuan	407	17.9607	2.58994
Pelatihan	407	15.3219	2.65729
Konflik Afektif	407	15.3440	2.56724
Konflik Kognitif	407	15.3440	2.56724
Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	407	23.1646	3.92478

Berdasarkan tabel .6 dapat disimpulkan pelatihan yang diadakan masih sedikit, kejelasan tujuan masih kurang dan dukungan atasan sangat kuat. Konflik kognitif maupun afektif jarang terjadi. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memberikan kontribusi untuk pengelolaan dana secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Variabel kejelasan tujuan didefinisikan sebagai kejelasan dari sasaran dan tujuan digunakan sistem akuntansi keuangan daerah di semua level organisasi terdiri dari 6 pertanyaan. Sedangkan pelatihan merupakan suatu usaha pengarahan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman mengenai sistem (Chenhall, 2004) terdiri dari 6 pertanyaan instrument yang dibangun oleh Shield dan Young (1989) dan Shield (1995) yang dimodifikasi. Skor dari item 1 = Sangat Tidak Sesuai hingga 5 = Sangat Sesuai.

Konflik Kognitif dan Afektif, Konflik merupakan kesenjangan antara ide individu dan lawannya. Hal ini seringkali dihubungkan dengan situasi dimana



sumber daya yang tersedia terbatas sehingga individu organisasi berusaha saling menghalangi tercapainya tujuan dari yang lain (Robbins, 1989) . Menurut Swihweig dkk berpendapat bahwa konflik di satu pihak dapat meningkatkan kualitas keputusan, namun dilain pihak dapat menurunkan kemampuan individu untuk kerjasama.

Konflik kognitif disebut konflik yang mempunyai efek menguntungkan, sedangkan yang menimbulkan penyimpangan disebut konflik afektif (Amason dan Schweiger, 1994) . Konflik kognitif dan afektif diukur dengan menggunakan 6 item yang dikembangkan oleh Jehn (1994) dan digunakan oleh Jehn (1994) dan Amason (1996). Skala 1 = Sangat Tidak Sesuai hingga 5 = Sangat Sesuai.

Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Adapun Kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah ini diharapkan dapat memenuhi tuntutan dari masyarakat tentang transparansi dan akuntabilitas dari lembaga sector public. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dapat berguna untuk mengelola dana secara transparan, ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel. Pengukuran kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah berdasarkan item yang dikembangkan dengan memodifikasi instrument yang digunakan oleh chenhall (2004) dan disesuaikan dengan kegunaan sistem keuangan daerah.

Faktor organisasional terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah diukur dengan menggunakan 9 pertanyaan item instrument yang dibangun oleh Shield dan Young (1989) dan Shield (1995) yang dimodifikasi. Skor dari item dari 1 = Sangat Tidak Sesuai hingga 5 = Sangat Sesuai.

#### 4. Uji Kualitas Data

Uji reliabilitas data dilakukan dengan melihat nilai *Cronbrach Alpha* ( $\alpha$ ) dari variabel yang diteliti. Hasil pengujian reliabilitas data menunjukkan bahwa nilai *Cronbrach Alpha* ( $\alpha$ ) dari keenam variabel berada diatas 0,60. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi tingkat reliabilitas yang disyaratkan. Hasil pengujian validitas data dengan menggunakan program SPSS 12,0 menunjukkan bahwa instrumen terbukti valid. Hal ini dapat dilihat melalui hubungan korelasi masing-masing item terhadap skor total menunjukkan tingkat signifikansi pada level di bawah 0,01. Variabel kejelasan tujuan menunjukkan tingkat signifikansi antara 0,000-0,024. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan korelasi masing-masing item terhadap skor total valid pada tingkat signifikansi 0,01-0,05.

#### 5. Uji Asumsi Model

Asumsi-asumsi untuk terpenuhinya pada pengujian model *analisis path* atau analisis jalur ini adalah sebagai berikut:

##### a. Ukuran sampel

Sampel minimum yang diharapkan dapat kembali minimal 100 eksemplar, sesuai dengan ketentuan yang diisyaratkan untuk analisis data menggunakan *Structural Equation Model* Hair *et al.*, (1998). Jumlah tersebut mencukupi sebagai ukuran sampel untuk kepentingan analisis. Data yang dapat digunakan untuk dianalisis berjumlah 407 sehingga terpenuhi ukuran sampel.

##### b. Uji Normalitas data

Dengan menggunakan critical ratio sebesar  $\pm 2,58$ , pada tingkat 95 % signifikansi alfa 0,1 (1%) disimpulkan bahwa ada beberapa data yang mempunyai sebaran tidak normal. Hal ini dapat dibuktikan bahwa nilai CR dari variabel Konflik Kognitif, dan variabel Konflik Afektif berada diatas 2,58.

**Tabel . 7**  
**Hasil Uji Normalitas Data**  
**Assessment of normality (Group number 1)**

	Variable	Min	Max	skew	c.r.	kurtosis	CR
B	TPL	1.00 0	23.00	.360	2.967	1.904	7.84 1
	TKT	19.0 00	26.000	2.907	23.943	7.566	1.156
	TDA	20.0 00	28.000	.720	5.929	.642	2.645
	TAF	19.0 00	26.000	.756	6.226	.918	3.581
	TKG	18.0 00	27.000	.483	.980	.302	2.580
Berb	TKS	27.0 00	43.000	2.395	19.724	5.770	23.759
	Multivariate					16.094	16.569

agai macam statistik non parametrik mengemukakan aturan yang harus dilakukan bahwa analisis data tidak dapat dilanjutkan apabila data tidak berdistribusi normal. Namun sekarang terdapat perspektif baru di dalam estimasi non parametrik yang berkaitan dengan parameter dan confidence interval estimation untuk variabel metrik. Kita tidak perlu berasumsi bahwa confidence interval untuk parameter mengikuti suatu distribusi normal. Pendekatan non parametrik ini dikenal dengan resampling (Hair et.al, 1998). *Resampling* dapat dilakukan dengan menggunakan kekuatan komputasi untuk mengukur nilai parameter dari sampling. Metode yang digunakan untuk

resampling yaitu dengan bootstrap. Dikarenakan data yang diperoleh dalam penelitian ini tidak berdistribusi normal, maka peneliti menggunakan fasilitas *bootstrap*.

### 3. Outlier Model

Outlier model atau juga disebut dengan structural model mendefinisikan hubungan antara indikator-indikator dengan konstruk atau variabel latennya. Dalam outlier model peneliti dapat menguji sejauh mana indikator-indikator pengukuran sesuai dengan teori-teori yang digunakan untuk mendefinisikan suatu konstruk. *Validitas* (*validitas konveergen* dan *diskriminan*) dan *realibilitas konstruk* menjadi focus utama dalam *outlier model*.

Pada Tabel.8 di bawah ini menampilkan konstruk dan indikator-indikator yang akan diuji validitasnya dan reabilitasnya. Melalui PLS untuk menguji outer model akan menggunakan fungsi algorithm.

**Tabel .8**

**Konstruk dan iIndikator-indikatornya**

<b>Kode</b>	<b>Uraian</b>
X1	Tugas-tugas yang diberikan telah disederhanakan sehingga setiap pegawai dapat mengerjakannya
X2	Atasan memberi wewenang kepada anda untuk melakukan pekerjaan menurut cara anda?
X3	Atasan mendukung pada keputusan yang anda buat dalam pekerjaan
X4	Berbagai pengetahuan dalam bidang manajerial dipunyai oleh atasan
X5	Cara-cara kerja spesifik telah dijelaskan
X6	Sudah ada cara-cara yang mudah untuk mengecek apakah suatu pekerjaan telah atau belum dilaksanakan
X7	Apakah berbagai bidang ketrampilan kerja dipunyai pimpinan
X8	Tujuan setiap pekerjaan yang anda kerjakan didefinisikan dengan jelas
X9	Tujuan organisasi diberikan dengan jelas oleh pimpinan
X10	Para pegawai patuh dan loyal kepada pimpinan
X11	Melaksanakan pekerjaan dengan kualitas bagus membuat saya merasa dapat mengembangkan kemampuan saya.
X12	Anda telah mengetahui bahwa pekerjaan anda berkaitan dengan tujuan kelompok/ organisasi.
X13	Pencapaian tujuan dari setiap tugas selalu ditekan pada lembaga anda .
X14	Para pegawai dapat mengejakan dengan sistem yang baru tanpa ada rasa takut.
X15	Para pegawai selalu menekankan untuk dapat melaksanakan pekerjaan dengan kualitas yang tinggi

X16	Para pegawai merasa bebas dan tidak takut untuk tidak menyetujui pendapat dan tindakan atasan.
X17	Pimpinan menaruh kepercayaan kepada anda ?
X18	Pimpinan menyetujui pendapat dan inisiatif anda
X19	Pekerjaan pegawai memuaskan .
X20	Anda diberikan kebebasan untuk mendiskusikan berbagai masalah dengan atasan anda.
X21	Aatasan selalu memperhatikan problem yang anda hadapi
X22	Terdapat kesetia kawan pada kelompok kerja anda dan masing-masing saling member bantuan .
X23	Kontribusi anda kepada lembaga mendapat tanggapan yang menyenangkan .
X24	Berbagai masalah yang muncul telah diberikan pemecahannya dengan teliti.
X25	Semua dukungan dari atasan diterima semua oleh pegawai.
X26	Tingkat sasaran prestasi yang ingin dicapai oleh organisasi sangat tinggi.
X27	Pelatihan yang diberikan untuk meningkatkan pekerjaan telah diberikan cukup banyak jenis pelatihan.
X28	Fasilitas pelatihan yang diberikan sangat bagus .
X29	Jenis Pelatihan yang diberikan sudah sesuai dengan yang diinginkan dan sesuai dengan pekerjaan.
X30	Yang dikirim dalam pelatihan adalah mereka yang bekerja sesuai bidangnya .
X31	Setiap ada penerapan sistem baru selalu diberikan pelatihan terlebih dahulu.
X32	Pencatatan transaksi keuangan dalam jurnal selalu menggunakan bukti transaksi yang sah dilakukukan secara kronologis.

X33	Posting dari jurnal ke buku besar dilakukan secara periodic (berkala) ?
X34	Laporan keuangan disusun oleh PPK- SKPD, Laporan berupa LRA, Neraca, CALK..
X35	Paling lambat Laporan Realisasi Semester I diserahkan ke PPKD tidak lebih dari 10 hari setelah semester pertama tahun anggaran terakhir.
X36	Laporan Keuangan mendorong SKPD untuk menggunakan Sumber Daya secara efisiensi dan efektif .
X37	Prosedur antara keuangan yang ada tidak bertentangan dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Permendagri No. 59 tahun 2007 serta Prosedur yang disusun Pejabat berwenang daerah/perda.
X38	Laporan Keuangan yang baik mencerminkan tatakelola pemerintahan yang baik .
X39	Pengguna Anggaran ( PA) bertanggungjawab atas pengguna anggaran melalui laporan keuangan yang disusun telah berdasarkan Permendagri No. 13 tahun 2006 dan Permendagri no.59 tahun 2007 .
X40	PPKD –SKPD dalam menyelenggarakan catatan akuntansi berkoordinasi dengan bendahara pengeluaran..

Dari hasil komputasi terlihat bahwa tidak ada nilai *z-score* yang lebih besar atau sama dengan 3, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada univariate outlier dalam data penelitian ini. Pengujian terhadap multivariate outlier dilakukan dengan melihat kriteria jarak *Mahalanobis* pada tingkat  $p < 0,001$  dievaluasi dengan *Chi-Square* ( $\chi^2$ ) pada derajat bebas sebesar jumlah variabel yang digunakan dalam penelitian. Apabila hasil menunjukkan nilai *mahalanobis distance*  $> \chi^2$ , maka diidentifikasi sebagai multivariate outliers. Hasil pengolahan data dengan menggunakan *AMOS 16.01* dalam

lampiran tidak terlihat adanya multivariate outlier dibuktikan dengan tidak adanya kasus yang memiliki *mahalanobis distance*  $> \chi^2$ .

#### 4. Evaluasi *Multicollinearity* atau *Singularity*

Evaluasi terhadap *multicollinearity* dan *Singularity* dilakukan dengan melihat determinan matrik kovarian. Determinan matrik kovarian yang kecil mengindikasikan *multicollinearity* atau *singularity* (Tabachnick & Fidell, 1998 dalam Ferdinan, 2005). Pengujian data menggunakan *AMOS 16.0* pada lampiran menunjukkan bahwa nilai *determinant of sample covariance matrix* sebesar 1,6432e+004. Ini berarti keseluruhan data yang digunakan pada penelitian ini layak digunakan karena tidak terdapat *multicollinearity* dan *singularity*.

### 6. Pengujian Hipotesis

#### a. Pengujian Hipotesis Hubungan Faktor Organisasional dengan Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Hasil pengujian hipotesis penelitian (H1a) menunjukkan bahwa nilai *critical ratio* (CR) adalah -1,667 dan nilai probabilitas (p) adalah 0,0167. Dengan demikian hasil uji statistik tidak berhasil membuktikan adanya hubungan positif pelatihan dengan Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Hasil Analisis tersebut diatas ditunjukkan pada Tabel 9.

Hasil pengujian hipotesis penelitian (H1b) menunjukkan bahwa nilai *critical ratio* (CR) adalah -2,015 dan nilai probabilitas (p) adalah 0,0177. Dengan demikian hasil uji statistik tidak berhasil membuktikan adanya hubungan positif kejelasan tujuan dengan kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah karena nilai CR menunjukkan nilai yang negatif. Hasil Analisis tersebut diatas ditunjukkan pada Tabel 9.



Hasil pengujian hipotesis penelitian (H1c) menunjukkan bahwa nilai *critical ratio* (CR) adalah 3,289 berada di atas ambang batas nilai kritis 1,96 pada signifikansi 5% dan nilai probabilitas (p) adalah 0,0061 Dengan demikian hasil uji statistik berhasil membuktikan adanya hubungan positif dukungan atasan dengan kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Hasil Analisis tersebut diatas ditunjukkan pada Tabel 9.

## 2. Pengujian Hipotesis Hubungan Faktor Organisasional dengan Konflik

Hasil pengujian hipotesis 2a menunjukkan bahwa nilai *critical ratio* (CR) adalah -3,353. dan nilai probabilitas (p) adalah 0,0056. Namun CR menunjukkan angka negatif yang berarti terdapat hubungan negatif antara training dengan konflik kognitif. Dengan demikian hasil uji statistik tidak berhasil membuktikan adanya hubungan positif pelatihan dengan kegunaan konflik kognitif. Hasil Analisis tersebut diatas ditunjukkan pada Tabel 9.

Tabel 9

### HASIL ANALISIS DAN INTERPRETASI PARAMETER ESTIMASI

	H	SE	CR	P	Keputusan 5 %	Keputusan10 %
TKG <--- TDA	H2a	0,456	-3,353	0,0056	Signifikan	Signifikan
TAF <--- TDA	H3a	0,311	3,297	0,0059	Signifikan	Signifikan
TKG < --- TKT	H2b	0,376	-3,369	0,0065	Signifikan	Signifikan
TAF < --- TKT	H3c	0,256	-2,234	0,0157	Tidak signifikan	Tidak signifikan
TKG < --- TPL	H2c	0,690	-3,482	0,0051	Signifikan	Signifikan
TAF < --- TPL	H3b	0,470	3,362	0,0056	Signifikan	Signifikan
TKS < --- TKG	H4	0,291	2,167	0,0153	Tidak signifikan	Tidak signifikan
TKS < -- TAF	H5	0,428	3,332	0,0056	Signifikan	Signifikan
TKS < --- TPL	H1a	0,133	-1,667	0,0167	Tidak signifikan	Tidak signifikan

TKS <--- TKT	H1b	0,203	-2,015	0,0177	Tidak Signifikant	Tidak signifikan
TKS <---- TDA	H1c	0,344	3,289	0,0061	Signifikan	Signifikan

1,

Hasil pengujian hipotesis 2b menunjukkan bahwa nilai *critical ratio* (CR) adalah -3,369 dan nilai probabilitas (p) adalah 0,0056. Dengan demikian hasil uji statistik tidak berhasil membuktikan adanya hubungan positif kejelasan tujuan dengan konflik kognitif karena nilai CR negatif. Hasil pengujian hipotesis 2c menunjukkan bahwa nilai *critical ratio* (CR) adalah 3,482 dan nilai probabilitas (p) adalah 0,051. Dengan demikian hasil uji statistik tidak berhasil membuktikan adanya hubungan positif dukungan atasan dengan konflik kognitif. Hasil Analisis tersebut diatas ditunjukkan pada Tabel 9.

Hasil pengujian hipotesis 3a menunjukkan bahwa nilai *critical ratio* (CR) adalah -3,297 dan nilai probabilitas (p) adalah 0,059. Dengan demikian hasil uji statistik berhasil membuktikan adanya hubungan negatif antara pelatihan dengan konflik afektif. Hasil pengujian hipotesis 3b menunjukkan bahwa nilai *critical ratio* (CR) adalah 3,362 dan

nilai probabilitas (p) adalah 0,0056. Dengan demikian hasil uji statistik berhasil membuktikan adanya hubungan negatif kejelasan tujuan dengan konflik afektif. Dengan demikian hasil uji statistik tidak berhasil membuktikan adanya hubungan positif pelatihan dengan kegunaan konflik kognitif. Hasil Analisis tersebut diatas ditunjukkan pada Tabel 9.

Hasil pengujian hipotesis 3c menunjukkan bahwa nilai *critical ratio* (CR) adalah -2,234 dan nilai probabilitas (p) adalah 0,0157. Dengan demikian hasil uji statistik tidak berhasil membuktikan adanya hubungan negatif dukungan atasan dengan konflik afektif. Hasil Analisis tersebut diatas ditunjukkan pada Tabel 9.

### **3. Pengujian Hipotesis Hubungan Konflik dengan Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.**

Hasil pengujian hipotesis 4 menunjukkan bahwa nilai *critical ratio* (CR) adalah 2,167 dan nilai probabilitas (p) adalah 0,0153. Dengan demikian hasil uji statistik tidak berhasil membuktikan adanya hubungan positif konflik kognitif dengan kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Hasil Analisis tersebut diatas ditunjukkan pada Tabel 9. Hasil pengujian hipotesis 5 menunjukkan bahwa nilai *critical ratio* (CR) adalah 3,332 -1,737 dan nilai probabilitas (p) adalah 0,0056 0,082. Dengan demikian hasil uji statistik tidak berhasil membuktikan adanya hubungan positif konflik afektif dengan kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Hasil Analisis tersebut diatas ditunjukkan pada Tabel 9.

### **4. Pengujian Hipotesis Hubungan Faktor Organisasional dengan Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang Dimediasi dengan Konflik Kognitif dan Afektif**

Pengujian hipotesis 6 menunjukkan besaran efek tidak langsung (*indirect effect*) konflik kognitif sebagai variabel penyelang (*intervening*) di antara faktor organisasional dengan kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai *standarsized total effect* lebih besar dibandingkan *standarsized direct effect*. Dengan demikian terdapat hubungan positif faktor organisasional terhadap kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, jika dimediasi oleh konflik kognitif.

Pengujian hipotesis 7 menunjukkan besaran efek tidak langsung (*indirect effect*) konflik kognitif sebagai variabel penyelang (*intervening*) di antara faktor organisasional dengan Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai *standarsized total effect* lebih besar dibandingkan *standarsized direct effect*. Dengan demikian terdapat hubungan positif faktor organisasional terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, jika dimediasi oleh konflik kognitif.

### **G. Pembahasan Hipotesis**

Hasil pengujian hipotesis 1a (H1a) dapat diperoleh kesimpulan bahwa tidak terdapat hubungan positif antara pelatihan dengan Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Hasil temuan ini juga tidak dapat mendukung hasil penelitian Chenhall (2004) yang berhasil membuktikan bahwa training berhubungan positif dengan kegunaan ABCM pada tingkat signifikansi 10%. Hasil penelitian Cavalluzo dan Ittner (2004) juga berhasil membuktikan bahwa pelatihan terbukti berhubungan positif dengan kesuksesan implementasi sistem pengukuran kinerja pada tingkat signifikansi 10%. Hasil yang berbeda ini kemungkinan disebabkan fenomena di lapangan, dimana pelatihan yang diadakan terkait dengan implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah masih sedikit. Selain itu,

pelatihan yang diadakan masih belum melibatkan seluruh pegawai di bidang verifikasi dan anggaran.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ( 1b), dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif antara kejelasan tujuan dengan kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Hasil penelitian ini berbeda dengan temuan Chenhall (2004), yang berhasil membuktikan adanya hubungan positif antara kejelasan tujuan dengan kegunaan sistem *ABCM* pada tingkat signifikansi 10%. Hasil yang berbeda ini kemungkinan disebabkan karena fenomena yang terjadi, dimana ada suatu ketidak jelasan tujuan dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Hal ini disebabkan bergantinya regulasi atau Undang-Undang yang mengatur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Berdasarkan pengujian hipotesis 1c (H1c), dapat diperoleh kesimpulan bahwa ada hubungan positif antara dukungan atasan dengan kegunaan SAKD. Hasil penelitian ini berhasil mendukung penelitian Cavalluzzo dan Ittner (2004) yang menemukan bahwa dukungan atasan akan berpengaruh positif dalam implementasi sistem sehingga dapat meningkatkan kegunaan dari sistem. Penelitian Chenhall (2004) juga memberikan kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang positif antara dukungan manajemen puncak dengan kegunaan *ABCM* pada tingkat signifikansi 5%. Hasil pengujian dari hipotesis yang membahas hubungan faktor organisasional dan konflik menunjukkan bahwa dari keenam hipotesis yang diajukan ada dua hipotesis yang diterima.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (H2a), dapat diambil kesimpulan bahwa pelatihan berhubungan negatif dengan konflik kognitif. Begitu juga dengan hasil pengujian hipotesis (H2b) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara kejelasan tujuan dengan konflik kognitif. Hipotesis (H2c) tidak diterima yang berarti

tidak ada hubungan antara dukungan atasan dengan konflik kognitif. Hasil ini juga bertolak belakang dengan hasil penelitian Chenhall (2004) yang menyatakan bahwa pelatihan dan kejelasan tujuan berhubungan positif dengan konflik kognitif dalam tingkat signifikansi 5%. Namun penelitian Chenhall (2004) juga tidak berhasil membuktikan keterkaitan antara dukungan atasan dengan konflik kognitif.

Hasil pengujian hipotesis (H3a) memberikan kesimpulan bahwa pelatihan berhubungan negatif dengan konflik afektif. Hasil yang sama diperlihatkan pada hipotesis (H3b) dimana kejelasan tujuan berhubungan negatif dengan konflik afektif. Namun, hipotesis (H3c) menyimpulkan bahwa hubungan negatif antara dukungan atasan dengan konflik afektif tidak dapat dibuktikan. Penelitian berbeda dengan hasil penelitian Chenhall (2004) dimana hipotesis yang membahas mengenai hubungan faktor organisasional pelatihan, kejelasan tujuan dan dukungan atasan, tidak ada hipotesis yang diterima. Hasil penelitian Chenhall (2004) menyimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara faktor organisasional dengan konflik afektif.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (H4), konflik kognitif tidak berhubungan positif dengan Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa debat dan dialog berkenaan dengan implementasi sistem tidak dapat mendukung kesuksesan implementasi yang dibuktikan dengan tidak dapat meningkatkan kegunaan dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Penelitian ini juga berbeda dengan hasil penelitian Chenhall (2004) dimana konflik kognitif dapat meningkatkan kegunaan *ABCM*. Perbedaan ini dimungkinkan karena perbedaan budaya. Menurut Mas'ud (2005), masyarakat yang berada dalam budaya barat menerima konflik secara terbuka dan langsung. Hal tersebut biasa dilakukan

walaupun dengan atasan. Masyarakat dalam budaya timur, khususnya Indonesia konflik diusahakan dihindari. Apabila terpaksa terdapat konflik, diusahakan tidak terbuka dan tidak secara langsung. Budaya timur menganggap tabu adanya adu argumentasi dan debat karena dapat mengakibatkan perpecahan dan mengurangi kekompakan tim. Budaya barat sangat terbuka terhadap debat dan adu argumentasi karena dianggap dapat meningkatkan pemahaman. Debat yang dilakukan murni karena ingin mendapatkan pemahaman yang lebih baik akan informasi yang berkaitan dengan implementasi sistem tanpa melibatkan emosi. Berbeda dengan fenomena yang ada di Indonesia, dimana terjadinya debat dan perbedaan argumentasi akan melibatkan emosi yang pada akhirnya menyebabkan perselisihan, sehingga akan mengakibatkan perpecahan dalam tim kerja. Hasil pengujian hipotesis (H5), menunjukkan bahwa konflik afektif berhubungan negatif dengan kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ditolak pada tingkat signifikansi 5% akan tetapi hipotesis tersebut dapat diterima pada tingkat signifikansi 10%. Penelitian ini mendukung penelitian dari Chenhall (2004) dimana hipotesis yang menyatakan bahwa konflik afektif berhubungan negatif dengan kegunaan sistem *ABCM* diterima pada tingkat signifikansi 10%. Dengan demikian penelitian ini dapat membuktikan teori yang menyatakan bahwa konflik afektif memperlambat komunikasi dan proses kognitif, mengurangi kekohesifan kelompok dalam menerima ide baru, dan usaha saling menjatuhkan diantara anggota tim sehingga dapat menghambat kesuksesan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian ini dari analisis data dan pengujian hipotesis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dari faktor organisasional yang diuji, hanya dukungan atasan yang berpengaruh untuk meningkatkan Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Pengaruh pelatihan dan kejelasan tujuan terhadap kegunaan Sistem Akuntansi



Keuangan Daerah tidak berhasil dibuktikan. Konflik kognitif tidak berhubungan positif Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah . Konflik afektif berhubungan negatif Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Penelitian ini mendukung penelitian dari Chenhall (2004) dimana faktor konflik afektif berhubungan dengan kegunaan sistem *ABCM*. Hubungan tidak langsung antara faktor organisasional dengan kegunaan sistem yang dimediasi dengan konflik kognitif ada perbedaan yang sangat kecil.

## **B. Saran**

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Chenhall (2004) yang berlatar belakang budaya barat. Perbedaan budaya tersebut menyebabkan perbedaan pandangan dalam melihat konflik. Budaya barat yang mengakui bahwa konflik kognitif merupakan konflik positif . Hal ini tidak berlaku dalam budaya timur dimana konflik baik kognitif maupun afektif ditekan karena menimbulkan perpecahan. Perbedaan budaya tersebut dapat menimbulkan bias terhadap hasil penelitian. Hasil pengujian yang berbeda dengan peneliti sebelumnya kemungkinan juga diakibatkan oleh perbedaan obyek yang diteliti dimana penelitian Chenhall (2004) dilakukan pada perusahaan manufaktur sedangkan penelitian ini dilakukan pada sistem di pemerintahan. Responden penelitian terbatas pada Pemerintah Daerah SUBOSUKAWONOSRATEN, sehingga kemungkinan akan menghasilkan hasil yang berbeda, maka perlu untuk diperluasPropinsi lain di Indonesia supaya dapat digeneralisasi. Penelitian ini hanya dilakukan pada satu waktu (*cross sectional*), sehingga ada kemungkinan perilaku individu berubah dari waktu ke waktu. Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel lain, tidak terbatas pada faktor perilaku tapi juga faktor teknis dalam rangka implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

perlu untuk diteliti. Perlu dilakukan penelitian dengan sampel yang lebih banyak dan tidak terbatas pada masing-masing SKPD Dinas saja namun diperluas untuk seluruh Dinas di Pemerintahan Kabupaten maupun Pemerintahan Kota. Perlu dilakukan pengembangan instrumen, yaitu disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan dari obyek yang diteliti.

### **C. Implikasi**

Hasil penelitian ini memberikan sumbangan yang signifikan pada Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di Subosukowonosraten. Penelitian ini mempunyai implikasi yang luas dimasa yang akan datang, khususnya untuk penelitian-penelitian yang berkaitan dengan hubungan faktor berperilaku dalam kontribusi sebagai bahan pertimbangan dalam Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di Indonesia terutama yang berhubungan dengan perilaku dari pengguna. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan suatu gambaran kepada Pemerintah Daerah bahwa kesuksesan implementasi sistem tidak hanya ditentukan oleh faktor teknis dan dana, namun faktor perilaku dari kegunaan atau pengguna juga perlu diperhatikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rohman, 2009, Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah (survey pada Pemda di Jawa Tengah), *Jurnal Akuntansi & Bisnis*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Afiah, 2004, Pengaruh kompetensi anggota DPRD, kompetensi aparatur pemerintah daerah pelaksanaan sistem informasi akuntansi, penganggaran serta kualitas informasi keuangan terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintah daerah yang baik (survey pada kabupaten/ kota jawa barat). *Desertasi Doktor pada Universitas Padjadjaran Bandung*, Bandung.
- Ardi Hamzah, 2009, Pengaruh Ekspektasi Kinerja, Ekspektasi Usaha, Faktor Sosial sesuai Tugas dan Kondisi yang Memfasilitasi Pemakai Terhadap Minat Pemanfaatan Sistem Informasi ( Studi Empiris pada Pemerintahan Kabupaten di Pulau Madura), *Simposium Nasional Teknologi Informasi*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Alimbudiono, Ria Sandra & Fidelis Arastyo Andono. 2004, Kesiapan Sumber Daya Manusia Sub Bagian Akuntansi Pemerintah Daerah Kaitannya Dengan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah Kepada Masyarakat: Renungan Bagi Akuntan Pendidik. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*. Vol. 05 No. 02. Hal. 18–30.
- Azhar, 2008, Faktor-faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pada Pemerintah Aceh, *Thesis S2 Universitas Sumatra Utara*.
- Bandura, 1989, Social Cognitive Theory of Organizational Management, *Academy of Management Review*, Vol 14:361-384
- Chenhall, R.H (2004), The Role of Cognitif and Affective Conflict in Early Implementation of Activity-Based Cost Management. *Behavioral Reaserch in Accounting* 16:19

- Cohen, Sandra. February, 2007. Assessing It As A Key Success Factor for crucial Accounting Implementation In Greek Municipalities. *Journal of Financial Accountability & Management*.
- De Bruijn, Hans, 2002, Performance Measurement in The Public Sector: Strategies to Cope With The Risk of Performance Measurement, *The International Journal Of Public Sector Management*, Vol. 15. No.7 Hal. 578 – 594.
- Dinata & Anton Mulhar. 2004. Tinjauan Atas Kesiapan Sumber Daya Manusia pada Instansi Pemerintah Kota Palembang dalam Penerapan Akuntansi Daerah Menuju Terciptanya *Good Governance* di Era Otonomi Daerah, Skripsi, Universitas Sriwijaya, Indralaya.
- Djamaluddin, Rahmawati 2009, Pengaruh Faktor Individu dan Teknologi Terhadap Penerimaan Pembelajaran Berdasarkan Teknologi Web pada Mahasiswa Akuntansi Di Universitas Sebelas Maret Surakarta, *Simposium Nasional Teknologi Informasi*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Donnelly, Mike, John F. Dalrymple, & Ivan P.Hollingsworth.1994. *The Use and Development of Information Systems and Technology in Scottish Local Government*. *International Journal of Public Sector Management*,Vol. 7 No. 3. Hal 4-15.
- Doyle J, W. Ge & Mc Vay. 2006. Determinants of Weaknesses in Internal Control Over Financial Reporting. *Journal of Accounting and Economics*.
- Dunkk, A dan H. Perera, 1997, The incidence of budgetary slack: A field study exploration, *Accounting Auditing and Accountability, Journal*, 10(5): 649-664.
- Efferin, Sujoko. 2008. Metode Penelitian Akuntansi: Mengungkap Fenomena dengan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif. Edisi Pertama. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ellyana, Denovita. Achyar Redy & Ardi Hamzah. 2008. Variabel Anteseden & konsekuensi Pemanfaatan Sistem Informasi (Studi Empiris Pada Perintahan Kabupaten di Pulau Madura). *Accounting Conference, Doctoral Colloquium and Accounting Workshop*. Jakarta.
- Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik.2006. *Standar Akuntansi Pemerintahan: Telaah Kritis PP Nomor 24 Tahun 2004*. BPF, Yogyakarta.
- Hamzah, Ardi. 2009. Pengaruh Ekspektasi Kinerja, Ekspektasi Usaha, Faktor sosial, Kesesuaian Tugas dan Kondisi yang Memfasilitasi Pemakai terhadap Minat Pemanfaatan Sistem Informasi (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten di Pulau Madura).*Simposium Nasional Sistem Teknologi Informasi*. UGM.

- Hartono, ( 2004), *Metodologi Penelitian Salah Kaprah dan pengalaman* , BPFE UGM, Yogyakarta.
- Hendriksen, M.C. dan B.M.F. Van. 2005, *Accounting Theory*, Ed. New Jersey; Person Education, Inc.
- Heri Hidayat, 2008, Analisis Implikasi Ketidaksesuaian Rancangan Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah (SIKPD) Way Kanan Dengan Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Pada Pemerintah Daerah Kabupate Way Kanan, *Thesis S2 Universitas Gajah Mada*, Yogyakarta.
- Imam Ghozali (2006), *Aplikasi Analisis Multivariat Program SPSS* , Badan Penerbit Universits Diponegoro , Semarang .
- Imam Ghozali (2007), *Model Persamaan Struktur Konsep dan Aplikasi dengan Program AMOS Versi 16.0* Badan Penerbit Universits Diponegoro, Semarang .
- Imelda. 2005. Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIAKD) Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. *Skripsi*, Universitas Sriwijaya, Indralaya.
- Indra Bastian 2007, *Sistem Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.
- Indriasari, Desi, 2008. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *SNA XI*. Pontianak.
- Irvine Lapsley and June Pallott, 2000, Accounting Management and Organizational Change : A Comparative Study Of Local Government, *Management Accounting Reasearh*, 11, 213-229
- Jehn, 1994, Enthancing Effectivieness: An Investigation of Advantage and Disatventages of Value Based Intrragroup Conflict, *International Jurnal Of Confict Management* 5 : 233 – 238
- Jumali, Teddy & Bambang Supomo. 2002. Pengaruh Faktor Kesesuaian Tugas Teknologi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Akuntan Publik. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*.Vol 5 No.2 Hal. 214-228.
- Karunia Sari Nur, Pangesti, 2008, Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan SKPD: Study Kasus Penerapan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 di Pemerintah Daerah Kabupaten Batang, *Thesis S2 Universitas Gajah Mada*, Yogyakarta .
- Mahmudi ( 2007) , *Analisa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, YKPN, Yogyakarta.

- Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Vol. 2 No.1, Hal 1-17.
- Mas'ud, Fuad. 2004. *Survai Diagnosis Organisasional: Konsep & plikasi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mationo dan Pujiati, 2009, Pengaruh Computer Playfulness, Personal Innovativeness terhadap Cognitive Absorption dan Pengaruh Cognitive terhadap Usefulness dalam Penggunaan Teknologi Informasi, *Simposium Nasional Teknologi Informasi*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Mwita, Isaac John, 2000, Performance Manajemen Model, *The International Journal of Public Sector Manajement*, MCB University Press, Vol.13 No. 1, Hal 19-3
- Rahmawati, Djamaluddin, 2008, Pengaruh Faktor Individu dan Teknologi Terhadap Penerimaan Pembelajaran Berdasarkan Teknologi Web pada Mahasiswa Akuntansi Di Universitas Sebelas Maret Surakarta, *Majalah Ekonomi*, Universitas Airlangga Surabaya..
- Republik Indonesia . Undang-undang RI. No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia . Undang-undang RI. No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Republik Indonesia . Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Republik Indonesia . Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Republik Indonesia . Undang-undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
- Republik Indonesia . Undang-undang RI. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Republik Indonesia . Undang-undang RI. No. 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Shields, M. D., and S. M. Young (1989), Behavioral Model for Implementing Cost Management System, *Journal of Cost Management (Winter)*, 17:25
- Pamungkas, B, 2005, Pengaruh kualitas Peraturan Perundang-undangan, penerapan akuntansi keuangan sector public dan penerapan pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (survey pada pemerintah kabupaten dan pemerintah kota dipropinsi Daerah Istimewa Yogyakarta), *Desertasi Doktor pada Universitas Padjadjaran Bandung*, Bandung.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Wijanto dan Istiningsih, 2007, Pengaruh Kualitas Sistem Informasi, Perceived Usefulness, Dan Kualitas Informasi Terhadap Kepuasan Pengguna Akhir Software Akuntansi, *Simposium Nasional Akuntansi*, Pontianak.

Yuhernita, I. 2003, *Principial – Agent Theory dalam Proses Perencanaan Anggaran Sektor Publik*.

Yogiyanto HM, 2007, *Sistem Informasi Keperilakuan*, Andi , Yogyakarta